

Presiden:
Kesepakatan dengan
Singapura Perkuat Indonesia

Muhadjir:
Jangan Persulit Orang
Susah!

Sosok Ario Anindito
Dipercaya Menggarap
Komik Marvel!

BRAFOPMK

Edisi 10/Februari/II/2022

Berita dan Informasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



MENYAMBUT NUSANTARA

www.kemenkopmk.go.id

BRAFOPMK



Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Hari Gizi Nasional

Aksi Bersama Cegah Stunting & Obesitas

28 Februari 2022



Cegah Stunting
Ciptakan Generasi Sehat
Menuju Indonesia Maju

www.kemenkopmk.go.id



@kemenkopmk



kemenkopmk



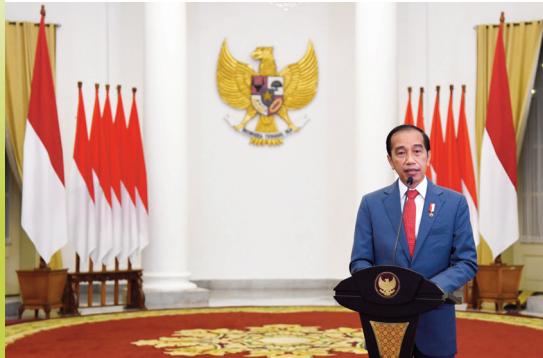
@kemenko_pmk



kemenkopmk

DAFTAR ISI

Edisi 10/Februari/II/2022



Presiden: Kesepakatan dengan Singapura Perkuat Indonesia

6

Menyambut Nusantara

16



22

Melongok Sejarah Ibu Kota Negara

SETELAH menjadi wacana selama puluhan tahun, Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur pada tahun 2019



28

Muhadjir: Jangan Persulit Orang Susah!

KEMENTERIAN KOORDINATOR Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mewanti-wanti penyaluran bantuan harus tepat sasaran.



Ario Anindito Komikus
Asal Bandung
Dipercaya
Menggarap
Komik Marvel!

24



42

Apresiasi Kesepakatan Pemilu, Puan: Harus Transparan

EDITORIAL

Edisi 10/Februari/II/2022

Nusantara Kita

"Apakah RUU tentang ibu kota negara ini, semua anggota menyetujui," tanya Pimpinan Sidang Puan Maharani di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022). "Setuju," jawab anggota yang hadir.

Demikian kutipan pamungkas para wakil rakyat selepas menggelar sidang paripurna terkait Ibu Kota Negara (IKN). Selepas beleid rampung, RUU ini bakal menjadi panduan yang komprehensif dari segi regulasi, dalam pembangunan segala aspek di IKN.

IKN sejatinya sudah dicetuskan Presiden Jokowi ketika 2019 silam. Persisnya pada sidang tahunan DPR/MPR. Jokowi menyampaikan pusat pemerintahan akan hijrah ke Kalimantan Timur dengan segenap alasan yang dirasa olehnya mendesak.

Setelah itu pemerintah mulai menyusun RUU IKN. Periodenya cukup panjang. Selain karena pembahasannya yang sangat kompleks, pada 2020 Indonesia dihadapkan pada pandemi covid-19. Sehingga seluruh perhatian tak bisa dialihkan dari Covid-19.

Kini perpindahan Ibu Kota bukan lagi mimpi, melainkan menjadi sebuah realitas yang nyata. Setelah RUU disahkan, pemerintah akan secara bertahap membangun Ibu Kota baru di Kalimantan Utara hingga 2024 mendatang.

Banyaknya disinformasi atau bahkan hoax yang bertebaran terlebih di Media Sosial (Medsos) terkait IKN, kami Redaksi BRAFO PMK merasa memiliki kewajiban untuk memberikan 'pencerahan' terhadap pembaca BRAFO PMK.

Oiya, satu lagi, perkenalkan, Nusantara. Nama baru Ibu Kota Republik Indonesia yang secara resmi ditunjuk Presiden Jokowi. Dengan menyebut nama Tuhan YME, kami persembahkan Majalah BRAFO PMK kali ini dengan tema "MENYAMBUT NUSANTARA".



Pembina:

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Pengarah:

Deputi dan Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Penanggung Jawab:

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:

Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi dan Komunikasi

Redaktur Pelaksana:

Danang A. Ichwan, Dian Novico

Tim Redaksi:

Ihti Oktarina, Achmad Soleh, Olivia Christine P, Dwi Prasetya, Puput Mutiara, Novrizaldi, Mega Hartati

Ahli Tata Letak/Produksi:

Rendi Febrianto, M.Yusuf Abdullah, Kristian Suryatna, Moch. Ragil

Sekretariat Redaksi:

Biro Hukum, Persidangan, Organisasi dan Komunikasi, Lantai 9 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Jl. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta 10110
Telp./Faks. (021) 386 0565, (021) 385 2165
Email: brafopmk@kemenkopmk.go.id
Situs: www.kemenkopmk.go.id

Redaksi menerima artikel atau tulisan juga foto. Redaksi berhak mengubah tulisan sepanjang tidak mengubah isi dan maknanya.

QUOTES

"Program pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur adalah bagian penting dari transformasi. Program IKN bukan sekadar pindah gedung pemerintahan, bukan itu. Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mindset, dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif,"

Ir. Joko Widodo (Jokowi)
Presiden Republik Indonesia

□ Joko Widodo. Foto: BPMI Setpres



"Stunting ini ruwet. Masyarakat juga masih banyak yang keliru. Stunting itu dianggap kalau tingginya kurang, beratnya kurang, padahal bukan itu. Stunting itu masalahnya pertumbuhan otak. Saat hamil sebenarnya bisa dilacak apakah janin ini bisa potensi stunting atau tidak. Yang sudah pasti, kalau saat 1000 HPK-nya tidak berhasil, intervensi seperti apapun tidak akan bisa,"

Muhadjir Effendy
Menko PMK RI



□ Muhadjir Effendy. Foto: Humas Kemenko PMK



"Indonesia terus berkomitmen dan berkontribusi dengan upaya kuat kami dalam memastikan praktik pengelolaan hutan serta dalam melindungi dan mengelola sumber daya alam. Kami menyerukan kerja sama dan kolaborasi dengan negara-negara untuk menuju pengelolaan hutan berkelanjutan,"

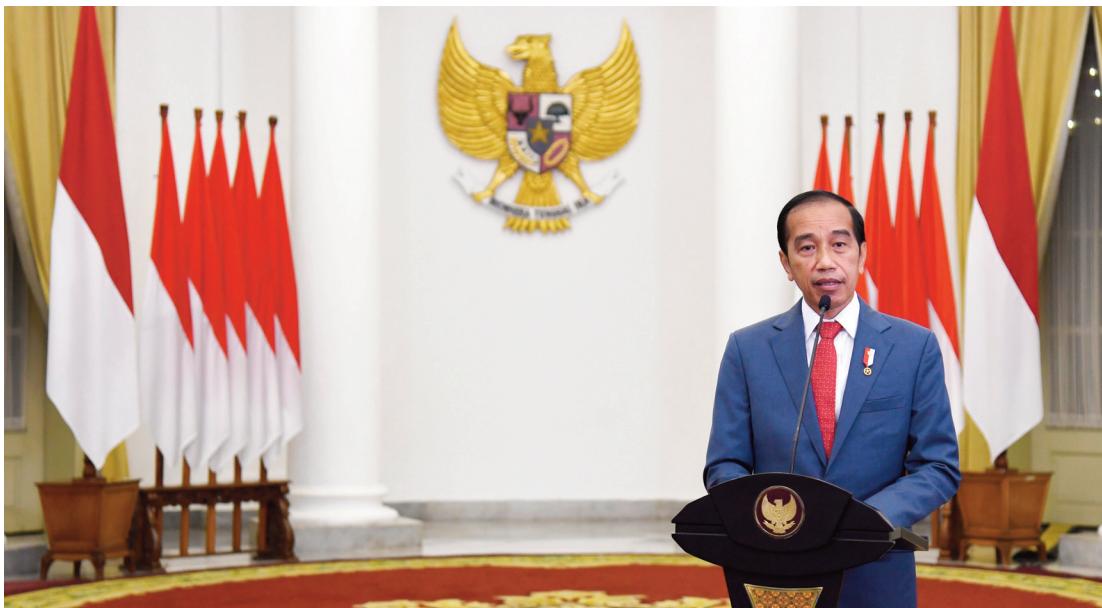
Luhut B. Pandjaitan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)



□ Luhut Binsar Panjaitan. Foto: Maritim

ISTANA

Presiden: Kesepakatan dengan Singapura Perkuat Indonesia



□ Presiden Joko Widodo. Foto: BPMI Setpres

BRAFOPMK - Presiden Jokowi menyambut baik kesepakatan di bidang politik, hukum, dan keamanan dengan Singapura. Kesepakatan tersebut antara lain Pertukaran Dokumen antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dengan Menteri Senior dan Menteri Koordinator Keamanan Nasional Republik Singapura tentang Perluasan Kerangka Pembahasan Indonesia-Singapura.

Kedua negara juga menandatangani kesepakatan terkait Perjanjian Ekstradisi, Persetujuan *Flight Information Region* (FIR), dan Pernyataan Bersama Menteri Pertahanan, tentang komitmen untuk memberlakukan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan.

"Untuk Perjanjian Ekstradisi, dalam perjanjian yang baru ini, masa retroaktif diperpanjang dari semula 15 tahun menjadi 18 tahun sesuai dengan Pasal 78 KUHP," ujar Presiden saat menyampaikan pernyataan pers bersama PM Singapura di Ruang Salon and Library, The San-chaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (25/01).

Sementara itu, dengan ditandatanganinya Perjanjian FIR, maka ruang lingkup FIR Jakarta akan melingkupi seluruh wilayah udara teritorial Indonesia, terutama di perairan sekitar Kepulauan Riau dan Kepulauan Natuna.

"Kedepan, diharapkan kerja sama penegakkan hukum,

keselamatan penerbangan, dan pertahanan keamanan kedua negara dapat terus diperkuat berdasarkan prinsip saling menguntungkan," ungkap orang nomor satu di republik ini.

Kedua negara juga menyepakati kerja sama di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Menurut Presiden, kerja sama di bidang SDM ini telah menjadi komitmen kedua negara sejak beberapa tahun lalu.

"Untuk tahun 2022, akan dilakukan pelatihan SDM antara Singapura dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk penguatan kapasitas di bidang *food industry 4.0 and supply chains*. Kerja sama seperti ini dapat dikembangkan lebih lanjut di berbagai daerah," imbuhnya.

Presiden Jokowi juga mengapresiasi penandatanganan *MoU on Human Capital Partnership Arrangement*. MoU akan memperkuat kerja sama riset, penguatan kelembagaan, dan pertukaran mahasiswa dalam rangka memperkokoh konsep Kampus Merdeka di Indonesia.

Di samping isu bilateral, Presiden dan PM Lee juga bertukar pandangan mengenai beberapa isu kawasan. Menurut Presiden, Indonesia dan Singapura memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya memperkuat kesatuan, cara kerja, dan kelembagaan ASEAN agar ASEAN siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. ■



□ Ma'ruf Amin. Foto: Setwapres

Meneguhkan Prinsip Washatiyah dalam Bingkai NKRI

BRAFOPMK - "Perdamaian dan kerukunan tersebut harus terus kita rawat dan lestarikan, salah satunya dengan terus menggemarkan nilai-nilai moderasi dalam beragama sesuai dengan prinsip *washatiyah*," ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin pada acara Halaqah Kebangsaan I Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET) MUI, melalui konferensi video di Jakarta, pada Rabu (26/01).

Umat Islam di Indonesia, sambung Wapres, dapat hidup berdampingan dalam perdamaian dan kerukunan bersama pemeluk agama lain karena Islam di Indonesia datang dan berkembang dengan cara yang damai, atau dengan prinsip jalan tengah (*wasathiyah*). Prinsip tersebut berhasil terwujud salah satunya berkat peran dari para ulama sebagai pewaris para nabi dan obor keteladanan bagi umat, terutama dalam konteks penguatan NKRI.

"Saya optimistis, jika ulama Indonesia bersatu padu dalam merawat dan meningkatkan moderasi Islam ini,

maka Islam wasathiyah di Indonesia akan menjadi poros pancaran harapan bagi lahirnya dunia yang damai sebagai awal menuju dunia yang sejahtera," imbuhnya.

Ulama, lanjut Wapres, tidak dapat berjuang sendiri dalam mewujudkan perdamaian melalui Islam wasathiyah. Peran keluarga, guru, masyarakat luas sangat penting dalam upaya kolaboratif mencegah masuk dan menyebarluasnya paham radikal-terorisme.

Wapres juga mengingatkan agar cara-cara penyiaran (dakwah) masing-masing agama, menggunakan narasi-narasi kerukunan yang sejuk dan damai, bukan narasi konflik yang mengakibatkan terjadinya kebencian dan permusuhan antar pemeluk agama.

"Tugas kita adalah mengajak, berdakwah. Kita bukan memberi petunjuk. Tapi yang memberi petunjuk adalah Allah SWT. Karena itu, kita tidak perlu berlebihan dalam menyampaikan dakwah, sebagaimana yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya," pungkas Wapres. ■

BINGKAI

Antisipasi Penyebaran COVID-19 Varian Omicron di Permukiman

Petugas PMI menyemprotkan cairan disinfektan di area permukiman warga di kawasan Kelurahan Maphar, Jakarta, Kamis (10/2/2022). Penyemprotan disinfektan tersebut untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 varian Omicron di lingkungan padat penduduk.

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja



Vaksinasi Booster COVID-19 Door To Door

Petugas kesehatan melakukan skrining sebelum menyuntikkan vaksin booster COVID-19 di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Senin (17/1/2022). Layanan vaksinasi booster COVID-19 secara rumah ke rumah tersebut guna memudahkan warga Lansia untuk mendapatkan vaksin sebagai upaya percepatan vaksinasi booster COVID-19. *ANTARA FOTO/Fauzan*



Ketersediaan Oksigen di DKI Jakarta

Pekerja mengisi tabung oksigen yang sudah dipesan di Manggarai, Jakarta, Senin (31/1/2022). Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan ketersediaan pasokan oksigen di seluruh fasilitas kesehatan Jakarta tercukupi seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 dan keterisian tempat tidur (BOR) di rumah sakit rujukan COVID-19. **ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga**

Penambahan Kapasitas Tempat Isolasi COVID-19

Pasien COVID-19 tiba untuk menjalani isolasi di Hotel Singgah COVID-19, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (31/1/2022). Pemerintah Kabupaten Tangerang kembali membuka tower baru untuk menambah kapasitas kamar isolasi bagi pasien COVID-19 dengan total kapasitas 240 kamar setelah meningkatnya kasus COVID-19 di kabupaten tersebut. **ANTARA FOTO/Fauzan**



NEWS FLASH

Kepala Bappenas Ajak Generasi Muda Bangun IKN Nusantara

BRAFOPMK - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dilakukan secara bertahap. Artinya, tidak terjadi pemindahan pemerintahan sekaligus. Hal tersebut diungkapkan langsung Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Dirinya bahkan menantang generasi muda membangun IKN Nusantara.

"Memangnya kaya lampu Aladdin? Nggaklah. Kita bangunnya secara bertahap," kata Suharso dalam sebuah acara 'Adu Perspektif: Ibu Kota Nusantara, Antara Realita dan Utopia', Rabu (26/1/2022). Berdasar masterplan yang disusun ahli Bappenas, pembangunan IKN Nusantara dilakukan hingga 2045. "Tapi 2045 boleh saja akan ada perkembangan yang lain," tambah Suharso.

"Jadi dia tidak kemudian tiba-tiba 'semua, ayo kita pindah'. Tidak juga. Tapi *staging*-nya ada. Jadi tidak usah dikhawatirkan," sambung dia.

Suharso mengatakan, pada 2024, infrastruktur dasar itu sudah dibangun di IKN Nusantara. Dia mengaku sudah berencana berkantor di IKN Nusantara pada 2024.

"Karena kita juga sedang memikirkan bagaimana Jakarta ke depan. Jakarta ke depan masih akan tetap cantik, tetap menarik, dan tetap akan dikunjungi, dan tetap akan menjadi pusat kegiatan ekonomi," katanya.

Dia mengatakan pembangunan IKN Nusantara ialah upaya 'membuka peluang baru'. Suharso menantang generasi muda untuk ikut andil membangun IKN Nusantara. "Saya tantang generasi milenial untuk membangun di sana," pungkasnya. ■



□ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Foto: Dok. Bappenas.



□ Foto: Istimewa

Ambisi 'Menduniakan' Kopi Manglayang

BRAFOPMK - Stok pohon kopi di Bandung kian bertambah. Pohon kopi diharapkan mampu mengangkat perekonomian warga Bandung. Penambahan pohon tersebut dilakukan melalui CSR Bank bjb.

Ada 1.000 bibit pohon kopi yang ditanam di Desa Ciporeat, Kecamatan Cileungkrang, Kabupaten Bandung. Penanaman pohon tersebut merupakan bentuk CSR bank BUMD di Jabar melalui Yayasan Maratia.

Ketua Yayasan Maratia Gilang Hartanto mengatakan pohon kopi dipilih lantaran bisa memberi efek peningkatan ekonomi yang lebih cepat. Apalagi, kata dia, masyarakat sekitar sudah akrab dengan penanaman pohon kopi dengan produk Kopi Manglayang yang pemasarannya sudah cukup luas. "Ini sesuai dengan permintaan masyarakat di sini. Selain karena memberi efek ekonomi yang cukup baik, pohon itu pun memberi efek konservasi yang juga sangat baik," ujarnya berdasarkan keterangan yang diterima.

Kepala Desa Ciporeat Supriatna mengatakan ada tiga kelompok tani di wilayahnya tersebut. Kelompok tani ini, kata dia, aktif menanam dan menghasilkan biji kopi yang diberi nama Manglayang.

Dia mengatakan dengan adanya tambahan pohon kopi di wilayahnya, diharapkan bisa meningkatkan produktivitas dan meningkatkan perekonomian warganya. Apalagi, kata dia, banyak lahan yang siap digunakan untuk perkebunan kopi tanpa mengesampingkan fungsi konservasi.

"Ada lebih dari 10 hektare yang siap ditanami kopi," katanya. Dia juga menginginkan agar desanya menjadi area wisata dan edukasi. Sebab, dengan banyaknya stok pohon kopi, bisa menjadikan desa Ciporeat destinasi baru. Tidak menutup kemungkinan, ke depan Kopi Manglayang ini jadi ciri khas desa kami. Bahkan bisa mendunia. ■

Mantap, Kereta Cepat Jalur Tegalluar-Padalarang Siap Beroperasi



□ Foto: Dok. KCIC.

BRAFOPMK - Megaprojek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sudah mencapai 80 persen. Ujicoba kereta akan dilakukan dari Tegalluar-Padalarang di akhir tahun 2022 saat KTT G20.

Hal tersebut diungkapkan langsung Direktur Manajemen Proyek dan Pengembangan Bisnis PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Allan Tandiono saat stadium generale yang diselenggarakan ITB, Rabu (26/1).

"Untuk hari ini, 26 Januari (2022) sudah melewati (progres penggerjaan) 80 persen. Targetnya itu sesuai yang disampaikan Presiden, akhir tahun pada saat summit G20 kami akan uji coba kereta dari Tegalluar berjalan kurang lebih 30 km menuju Padalarang," ucap dia.

Allan menuturkan beberapa proyek penggerjaan sudah hampir rampung. Untuk penggerjaan *bridge* misalnya sudah mencapai 89,30 persen, kemudian subgrade 78,41 persen. "Kemudian *tunnel* (terowongan) sudah 98 persen," kata dia.

Allan menjelaskan sejumlah progres penggerjaan yang sudah dilakukan hingga akhir tahun lalu. Beberapa terowongan sudah berhasil ditembus, stasiun Halim sudah selesai *topping off* dan kereta cepat yang dirakit di Tiongkok sudah selesai. "Saat ini

(kereta) sedang uji dinamis di pabrik," katanya.

Dia mengatakan untuk proyek ini rencananya akan ada total 13 terowongan yang berada di sejumlah titik jalur KCJB sepanjang 142,3 kilometer tersebut. Dari 13 terowongan, salah satunya diklaim menjadi terowongan pertama terpanjang dalam sejarah transportasi darat di Indonesia.

Sementara itu untuk kapasitas penumpang, kereta ini mampu mengangkut 600 penumpang dengan terdiri dari kategori VIP 18 (penumpang), *first class* 28 (penumpang) dan *second class* 555 penumpang.

"Untuk travel time kami targetkan 36-45 menit Jakarta Bandung dan ini tergantung apakah *direct* atau masih berhenti di Karawang akan disesuaikan dengan *demand* dan kebutuhan yang nanti ada saat operasikan," katanya.

Sementara itu, bentuk desain eksterior kata Allan, KCJB mengadopsi bentuk hewan khas Indonesia yaitu Komodo. Bagian interiornya juga disesuaikan dengan ciri khas Indonesia. Salah satunya dengan menggunakan batik Megamendung untuk kursi penumpang. Sedangkan untuk waktu pengoperasian, Allan mengatakan kereta tersebut akan beroperasi setiap hari mulai pukul 05.30 WIB sampai pukul 22.00 WIB. ■

NEWS FLASH

Densus 88 Ajak Pergiat Medsos Perangi Radikalisme di Dunia Maya



□ Ilustrasi. Foto: Shutterstock

BRAFOPMK - Densus 88 Anti Teror akan melakukan upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap aksi terorisme dan radikalisme. Bahkan, Polri akan mengandeng pegiat media sosial (medsos) untuk melakukan kontra narasi di dunia maya mengingat terjadi peningkatan terorisme *lone wolf* atau pelaku teror pribadi.

"Melakukan penggalangan terhadap pegiat media sosial agar berperan aktif melakukan naratif. Jadi ada kontra-kontra yang menghasut, kita menggalang pegiat media untuk melakukan kontra naratif," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan di Mabes Polri pada Kamis, 27 Januari 2022.

Penggalangan pegiat media sosial ini diperlukan apabila ada hasutan-hasutan yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggungjawab dimana hasutannya mengarah kepada tindakan radikalisme dan terorisme. "Tentu ada juga upaya-upaya bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat (ormas) untuk ikut berkontribusi dalam rangka pencegahan radikalisme dan terorisme," tegasnya.

Ramadhan mengatakan, Densus 88 Polri juga akan

koordinasi dengan Bareskrim dalam rangka penegakan hukum terhadap kelompok atau orang yang menyebarkan paham radikal mengarah teror, khususnya yang melanggar UU ITE. Di samping itu, kata dia, Polri melakukan upaya pencegahan dan pemantauan terhadap penyebaran hasutan, provokasi radikal dan ekstrim yang berbasis kekerasan mengarah terorisme di dunia maya.

"Itu dilakukan juga oleh kawan-kawan densus, kemudian melakukan kegiatan kontra secara naratif terhadap hasutan provokasi ini merupakan bagian dari upaya-upaya *preemptif* dan *preventif*," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Boy Rafli menyebut jika fenomena aksi terorisme bergerak sendiri atau lone wolf mengalami trend peningkatan. Salah satu penyebabnya adalah penyebaran paham radikalisme melalui media sosial.

"Kemudian fenomena teror seorang diri lone wolf ini juga cukup meningkat," kata Boy. Menurut Boy, paham radikal banyak tersebar luas dan masif di media sosial saat ini. ■



□ Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Foto: Kemnaker

Kemnaker Dorong Pelatihan Vokasi Bagi Penyandang Disabilitas

BRAFOPMK - Kemnaker memiliki perhatian yang besar terhadap isu ketenagakerjaan terutama bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses penuh di sektor ketenagakerjaan. Pemerintah juga terus mendorong adanya pelatihan vokasi yang menjadi alternatif untuk mendapatkan sertifikasi yang terkompetensi.

"Ini juga menjadi pilihan bagi disabilitas untuk mendapatkan standar yang layak dengan cara sertifikasi kompetensi," ucap Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah ketika menerima audiensi Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (25/1/2022).

Ida mengemukakan, terkait keketuaan G20 sektor ketenagakerjaan, Kemnaker memprioritaskan ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Ini harus menjadi perhatian bagi negara maju dan negara berkembang untuk menjadikan sektor ketenagakerjaan yang inklusif itu menjadi isu ketenagakerjaan.

"Kita ingin menjadi tolok ukur bagi negara-negara lain bahwa isu inklusif bagi penyandang disabilitas itu adalah isu prioritas. Kami meyakini ini akan akeleratif kalau kita angkat di pertemuan G20," sambung Ida.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND), Dante Rigmalia, menambahkan, tantangan besar yang dihadapi KND adalah membangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.

"Jalur komunikasi ini harus tetap berada pada jalur tugas KND sebagai lembaga pengawasan dari pemerintah pusat dan daerah dalam hal penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas," tandasnya. ■

Industri Berbasis Ekonomi Hijau Makin Prospektif

BRAFOPMK - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) mengungkap IMI gencar mengampanyekan migrasi kendaraan berbahan bakar minyak ke bermotor listrik. Menurutnya, hal ini sejalan dengan upaya Indonesia mencapai *Net Zero Emission* (NZE) di tahun 2060.

Kampanye ini menjadi bagian dari upaya menggariskan sektor ekonomi hijau yang juga sejalan dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

"Kalangan dunia usaha harus responsif terhadap potensi industri berbasis ekonomi hijau yang akan menjadi primadona investasi masa depan dunia. Antara lain terdiri dari industri kendaraan listrik dan sumber-sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, panas bumi, dan angin," kata Bamsoet.

Bamsoet menilai ekonomi hijau tak hanya bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan memberikan nilai tambah bagi bangsa Indonesia. Namun juga mampu menyerap banyak tenaga kerja dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan bumi yang lebih baik.

"Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memprediksi potensi perdagangan karbon di Indonesia bisa mencapai Rp 350 triliun. Besarnya potensi ekonomi tersebut tidak lepas dari karena Indonesia mampu menyerap sekitar 113,18 gigaton karbon. Diperoleh dari luasnya hutan hujan tropis di Indonesia yang merupakan terbesar ketiga dunia dengan luas area 125,9 juta hektare yang mampu menyerap emisi karbon sebesar 25,18 miliar ton," pungkasnya. ■



□ Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Foto: Dok. MPR RI

GIAT SEREMONIAL



Menko PMK Hadiri Pencanangan Uji Klinis Vaksin Merah Putih Unair

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy (tengah) saat menghadiri Acara Pencanangan Uji Klinis Fase-1 Vaksin Merah Putih di RSUD Dr Soetomo Surabaya, Rabu (9/2/2022). *Foto: Humas Kemenko PMK*

9

Februari
2022

Surabaya,
Jawa Timur



Cek Venue Penyelenggara GPDRR ke-7

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berkesempatan meninjau kesiapan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali sebagai gerbang masuk delegasi internasional, Jumat (28/1/2022). *Foto: Humas Ke-menko PMK*

28

Januari
2022

Bali

25

Januari
2022

Solo,
Jawa Tengah



Atasi Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Kolaborasi Bangun Rumah Layak Huni

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhamdij Effendy (kanan) bersama Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka (kiri) berjalan menemui warga saat mengikuti peletakan batu pertama Program Penanganan Permukiman Kawasan Kumuh di Kampung Semangi, Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah, Selasa (25/1/2022). *Foto: Humas Kemenko PMK*

8

Februari
2022

Pekanbaru,
Riau



Menko PMK: Jangan Persulit Orang Susah!

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhamdij Effendy (kanan) saat meninjau langsung program penerimaan Bantuan Sosial sekaligus membagikan langsung paket bantuan 'Kemenko PMK Peduli' di Pekanbaru, Riau, Selasa (8/2/2022). *Foto: Humas Kemenko PMK*

FOKUS UTAMA

MENYAMBUT NUSANTARA

Menyiapkan SDM Mumpuni
Lewat Program Terintegrasi



□ Desain Ibu Kota Negara (IKN). Foto: Nyoman Nuarta

Presiden Jokowi menjadi orang nomor satu sekaligus motor pemindahan IKN ke Kalimantan. Bahkan, nama IKN juga sudah dipilih orang Nomor satu di republik ini. Ya, 'Nusantara', nama tersebut dipilih Jokowi dan menggugurkan 80 kandidat nama yang diajukan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ibu kota baru (IKN) Nusantara akan dijadikan contoh (*showcase*) kemajuan dan transformasi Indonesia di berbagai lini. Presiden ingin memamerkan IKN sebagai contoh transformasi suatu negara baik dari segi lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, dan teknologi. Termasuk mengakselerasi peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta tata sosial yang toleransi dan menjunjung etika publik.

"Program pembangunan IKN di Kalimantan Timur merupakan bagian penting dalam proses ini, IKN Nusantara akan kita jadikan showcase transformasi," ujarnya pada pembukaan Mandiri Investment Forum 2022, Rabu (9/2).

Selain IKN, Jokowi berharap juga dapat memamerkan kawasan industri hijau atau *green industrial park* di Kalimantan Utara sebagai transformasi lingkungan, sosial, dan pemerintah yang beralih menuju energi terbarukan.

Seperti diketahui, pemerintah sedang membangun proyek mega ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Proyek ini diharapkan dapat menumbuhkan pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Jokowi menargetkan ibu kota baru dapat pindah dalam semester I 2024. Saat ini, pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan UU IKN yang menjadi landasan hukum pembangunannya.

Salah satu aspek terpenting dalam proses pemindahan IKN tentunya adalah pembangunan manusianya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhamdij Effendy, menjelaskan, pembangunan manusia merupakan hal serius diperlukan dalam menyongsong pemindahan IKN.

Menurut Menteri Muhamdijir, membangun IKN dengan pendekatakan pembangunan fisik terbilang berat, selain butuh dana besar juga akan menimbulkan masalah dikemudian hari jika tidak dibarengi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pada saatnya, jika fisik selesai terbangun masyarakat lokal akan tersingkir karena tidak siap. "Makanya yang penting pembangunan manusianya," tegasnya.

Sebagai Koordinator Bidang Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan memastikan, pihaknya memastikan akan sering ke PPU bersama menteri terkait di bawah koordinasinya. "Kami sedang merancang program percepatan penyiapan SDM. Harus dicatat, 170 ribu warga Penajam Paser Utara (PPU) harus betul-betul siap hadapi perubahan besar. Harus sudah berani membayangkan perubahan besar yang akan terjadi saat pemindahan IKN," jelas dia.

Semua diajak bahu membahu bekerjasama menyiapkan putra/putri terbaik untuk menjadi bagian pembangunan IKN. "Ada 10 juta jiwa penduduk DKI Jakarta. Separuhnya saja 5 juta penduduk jika pindah ke Kaltim banyak. Makanya 170 ribu jiwa ini harus siap," katanya.

Sebagai penunjang, Muhamdijir akan mengumpulkan data secara akurat terkait potensi pemuda untuk melaksanakan langkah konkret memasuki era baru PPU menjadi IKN.

Kemenko PMK akan memprioritaskan program besiswa bagi putra/putri PPU untuk menempuh pendidikan yanh dibutuhkan dalam penyiapan lapangan pekerjaan yanh cocok pada 10 - 20 tahun mendatang. "Akan rancang tenaga kerja apa yang dibutuhkan. Kita siapkan dari anak-anak PPU," yakinnya.

Dalam mewujudkan IKN yang majemuk dan harmonis sesuai dengan identitas bangsa Indonesia, lanjut Muhamdijir, diperlukan pemahaman dan perencanaan aspek sosial-budaya dan sosial-ekonomi yang komprehensif. Perencanaan aspek sosial dilaksanakan dengan memastikan faktor-faktor, seperti penerimaan masyarakat, peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan dan pengembangan kearifan lokal, sumber-sumber penghidupan masyarakat, serta peran berbagai pihak termasuk generasi milenial dalam pembangunan IKN.

Bappenas Sipakan Program Terintegrasi

Membangun Ibu Kota Negara (IKN) tidak hanya menyiapkan infrastruktur dan lingkungannya saja, tetapi juga manusianya, baik yang akan pindah maupun yang telah lama menetap. Kementerian PPN/Bappenas telah memproyeksikan jumlah penduduk dan urbanisasi yang akan terjadi di Ibu Kota Negara. Saat ini, penduduk setempat Ibu Kota Negara tercatat 100 ribu jiwa.

Jumlah tersebut diperkirakan bertambah menjadi 700

FOKUS UTAMA



□ Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhamdij Effendy. Foto: Humas Kemenko PMK

ribu jiwa di 2025, kemudian berkembang menjadi 1,5-1,6 juta jiwa di 2035, hingga mencapai perkiraan 1,7-1,9 juta jiwa di 2045.

"Berdasarkan ini, kita akan merancang desain kotanya seperti apa, sistem transportasi, gedung, dan lainnya. Selain itu, kami tetap memastikan lingkungan hidupnya terjaga," jelas Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Prawiradinata.

Dijelaskan Rudy, Kalimantan Timur sejak dulu telah memiliki struktur sosial yang beragam. Sekitar 1,5 juta pendatang yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI beserta keluarganya, serta pelaku ekonomi lainnya akan hadir di wilayah IKN.

"Pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik sosial, ekonomi, maupun budaya masyarakat akan membantu Indonesia mewujudkan IKN yang "Smart, Green, Beautiful, and Sustainable," beber Rudy.

Pada 2018, jumlah penduduk Kalimantan Timur sebesar 3,6 juta jiwa diproyeksikan akan meningkat menjadi 5-7 juta jiwa di 2025, kemudian 8,7-9,7 juta jiwa di 2035, dan mencapai 10-11 juta jiwa di 2045. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak hanya mengembangkan wilayah IKN saja, tetapi juga wilayah sekitarnya.

Deputi Rudy juga menyatakan tidak ingin membuat IKN menjadi enclaved, sementara wilayah sekitarnya tidak berkembang atau didiamkan secara alami, tetapi pemerintah justru ingin memastikan pembangunan IKN dan wilayah sekitarnya berimbang.

"Bappeda dapat menyiapkan pelatihan vokasi serta Balai Latihan Kerja (BLK) untuk jenis pekerjaan yang bisa dikembangkan. Semua harus terintegrasi," jelas Rudy.

Menurut Deputi Rudy, terdapat beberapa sektor yang akan dikembangkan di IKN agar masyarakat setempat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Mulai dari sektor layanan, pendidikan tinggi, dan industri digital dan inovasi, ini yang akan dikembangkan di kawasan Ibu Kota Negara. Sektor-sektor ini akan menarik penduduk baru ke sana karena dalam urbanisasi, masyarakat tidak akan mau berpindah kalau tidak ada kesempatan baru.

"Kita juga akan mempersiapkan masyarakat setempat supaya bisa berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara. Ini akan menyerap tenaga kerja yang signifikan, belum lagi saat nanti Ibu Kota Negara sudah berkembang akan ada **demand-demand** baru yang cukup signifikan dari sisi pertanian, ekonomi kecil menengah, dan lainnya," jelas Deputi Rudy. ■

Andrinof Chaniago: Borneo Kejayaan Masa Depan Indonesia

Kekhawatiran sejumlah tokoh yang menolak pemindahan ibu kota negara (IKN) dinilai karena belum kenal lebih dekat dengan Pulau Kalimantan. Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago menganggap, sejumlah tokoh yang mendengungkan penolakan IKN ke Kalimantan tidak berdasar. Pasalnya hanya kekhawatiran belaka.

Padahal lanjut, Andrinof Chaniago, tidak sulit bagi mereka mendapatkan data dan dokumen tentang IKN. Buktiunya, banyak tokoh yang mendapatkan data-data dan dokumen eksklusif tentang rencana besar pemindahan ibu kota ke luar Jawa tersebut.

"Jangan tanpa data karena malas memburu data, kemudian beropini dan banyak berlindung dari kata 'Saya duga, saya khawatir' soal IKN di Kalimantan. Masyarakat awam jadi terpengaruh hal-hal yang tak berdasar datanya," ujar Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago yang juga merupakan penggagas pemindahan IKN.

Bagi mereka yang menolak pemindahan IKN ke Borneo sebutan nama lain Kalimantan lanjut Andrinof, karena tak kenal lebih dekat dengan pulau yang memiliki luas 743.330 km² itu. Padahal menurutnya, Kalimantan sangat layak menjadi ibu kota baru dengan segudang potensi yang dimiliknya.

"Sudah jelas lokasinya yang sangat strategis di tengah Indonesia dan di tengah Asia Pasifik. Ekonomi Kalimantan bisa berpindah dari ekonomi yang mengeksplorasi sumber daya alam ke ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ekonomi pariwisata," paparnya.

"Untuk sektor pariwisata, misalnya, kalau daerah itu beralih dari ekonomi tambang ke ekonomi pariwisata, kota-kota yang dilalui sungai-sungai besar di Kalimantan bisa seperti Shanghai, Bangkok, Melbourne, atau kota-kota waterfront city di Eropa. Itu adalah ekonomi yang sehat dan sekaligus penghasil devisa. Ekonomi beralih dari merusak alam menjadi merawat alam, karena pariwisata menimbulkan kesadaran akan lingkungan," jelasnya.

Dirinya menerangkan, jelas keliru besar membayangkan dari jauh bahwa Kalimantan hanyalah sisa-sisa hutan yang rusak. Makanya dengan ibu kota pindah, akan membawa Kalimantan bertransformasi secara sosial dan ekonomi, karena Kalimantan sangatlah menjanjikan bagi kejayaan masa depan Indonesia.

"Kalau ada orang-orang memandang remeh Kalimantan, saya pastikan yang bersangkutan kurang banyak piknik di dalam negeri. Tak kenal maka tak sayang. Borneo itu kejayaan masa depan Indonesia," tandasnya. ■



MENANGKIS OMICRON



■ Infografis: Rifki Setiadi/BRAFOPMK

BRAFOPMK - Di tengah aktivitas masyarakat yang berangsur-angsur normal, varian Omicron atau varian B.1.1.529 telah 'masuk' Indonesia. Masyarakat diminta untuk tetap waspada dan disiplin prokes. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah infeksi varian Omicron?

1. Hindari Bepergian ke Luar Negeri

Penambahan kasus varian Omicron di Indonesia, termasuk Jakarta, didominasi oleh WNI yang baru kembali dari perjalanan luar negeri.

2. Segera Lakukan Tes Bila Ada Gejala Demam

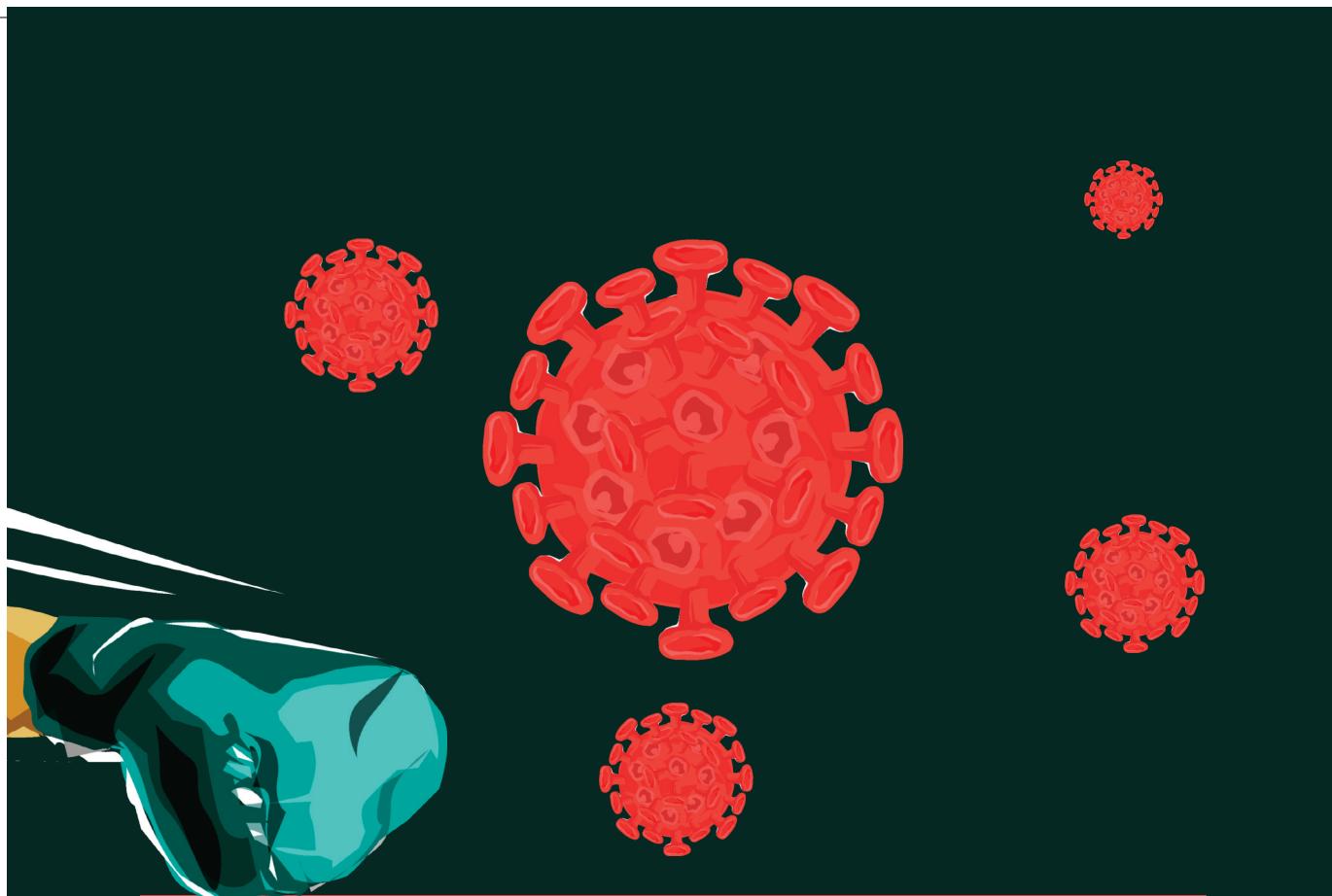
Varian Omicron memiliki gejala yang mirip dengan flu. Bedanya, infeksi Covid-19 yang bergejala kerap kali ditandai dengan demam. Sedangkan, flu bisa dengan

atau tanpa demam. Orang yang terinfeksi Covid-19 juga biasanya mengalami anosmia (kehilangan daya penciuman), sakit tenggorokan, batuk kering, hidung tersumbat, nyeri otot, hingga nyeri punggung bawah.

3. Vaksinasi dan 6M Masih Ampuh

Di samping menghindari perjalanan ke luar negeri, pencegahan varian Omicron dapat dilakukan dengan vaksinasi dan secara konsisten menerapkan 6M :

- a. Memakai masker
- b. Mencuci tangan
- c. Menjaga jarak
- d. Menjauhi kerumunan
- e. Mengurangi bepergian
- f. Menghindari makan bersama ■



AYO KENALI GEJALA VARIAN OMICRON

Varian omicron dan virus COVID-19 secara umum, dapat menyelinap ke tubuh seseorang dan menginfeksi tanpa mereka sadari bahwa mereka sakit.

1. **Merasa sakit**, tapi kamu tidak dites untuk COVID-19.



2. Kamu **mengira terkena flu**, tetapi itu benar-benar virus corona dan flu yang menginfeksi bersama-sama.



3. **Rambut rontok** dalam jumlah banyak.



4. **Keluar-gamu** sakit.



5. Kamu memiliki beberapa **masalah perut**.



6. Kamu mengalami **infeksi mata**.



7. Kamu mengalami **ruam atau infeksi aneh** pada jari kaki Anda.



8. **Sakit kepala**



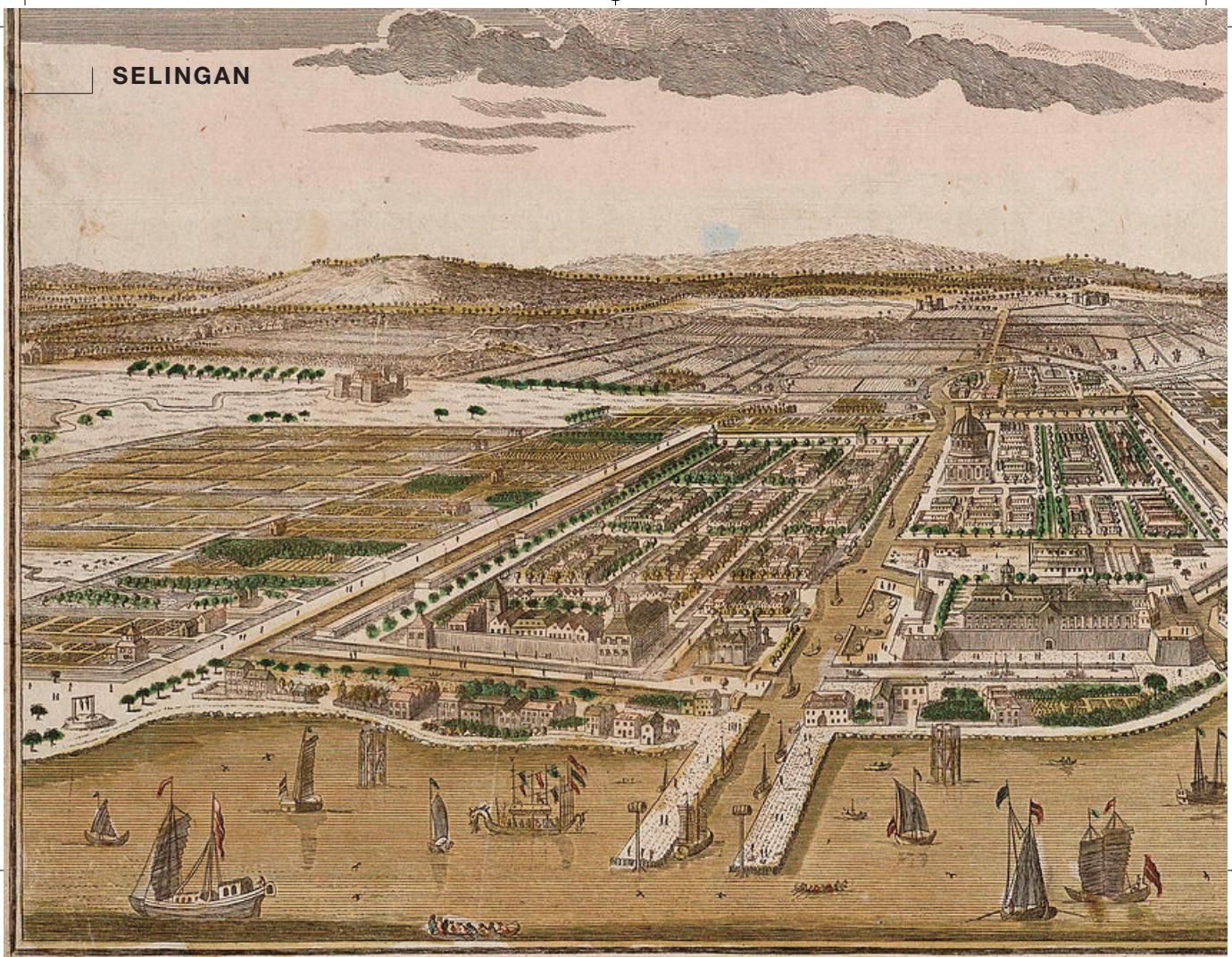
9. **Berkeringat** pada malam hari



10. **Muntah**



SELINGAN



Melongok Sejarah Ibu Kota Negara

Pemerintah akan memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dari sisi hukum ketatanegaraan, tindakan hukum pemindahan ibu kota merupakan kebijakan hukum yang sangat futuristik bagi masa depan Republik Indonesia.

Yogyakarta sebagai Ibukota

Pada awal tahun 1947 situasi keamanan di ibu kota Republik Indonesia di Jakarta sangat tidak aman. Pasukan Sekutu (AFNEI, *Allied Forces in Netherlands East Indies*),

yang diboncengi Belanda dengan nama NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) mulai melakukan razia-razia dan penangkapan atas pejuang kemerdekaan Indonesia. Beberapa kali terjadi kontak senjata antara pejuang dengan pasukan Sekutu, terutama di daerah perbatasan kota, seperti Meester Cornelis (Jatinegara dan Bekasi), Pasar Minggu dan lain-lain. Penjarahan dan perampukan terjadi dimana-mana.

Pasukan Jepang pun masih belum ditarik sepenuhnya, justru diminta mendukung operasi pengamanan ibu kota tersebut. Belum lagi muncul beberapa konflik antar pemimpin perjuangan. Bahkan terjadi beberapa kali



□ Gambar Batavia, ibu kota Hindia Belanda pada 1780.

Foto: Wikimedia Commons

- Kroya - Kutoarjo - Yogyakarta.

"Kita akan memindahkan ibu kota besok malam. Tidak ada seorang pun dari saudara boleh membawa harta benda. Aku juga tidak," kata Soekarno seperti ditulis Cindy Adams dalam biografi Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.[3] Maka disusun satu rencana nekat. Pada tanggal 3 Januari 1946 jelang tengah malam, sebuah gerbong kereta yang ditarik dengan lokomotif uap C.2809 buatan Henschel (Jerman) dan dimatikan lampunya berhenti di belakang rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 (Menteng) yang terletak di pinggir rel KA antara Stasiun Manggarai dan Gambir. Diharapkan, tentara Sekutu/NICA akan menyangka kereta tersebut hanyalah kereta biasa yang langsir menuju stasiun Manggarai.

"Dengan diam-diam, tanpa bernapas sedikit pun, kami menyusup ke gerbong. Orang-orang NICA menyangka gerbong itu kosong," kata Soekarno menggambarkan ketegangan saat itu. "Seandainya kami ketahuan, seluruh negara dapat dihancurkan dengan satu granat. Dan kami sesungguhnya tidak berhenti berpikir apakah pekerjaan itu akan berlangsung dengan aman. Sudah tentu tidak. Tetapi republik dilahirkan dengan risiko. Setiap gerakan revolusioner menghendaki keberanian."

Maka tanggal 4 Januari 1946 dini hari, kereta api tersebut membawa Bung Karno dan rombongan ke Yogyakarta di malam buta. Semua penumpang diliputi ketegangan. Rombongan tersebut pada akhirnya berhasil mencapai kota Yogyakarta dengan selamat. Pengelolaan dan pengendalian keamanan kota Jakarta selanjutnya diserahkan kepada Panglima Divisi Siliwangi, Letnan Kolonel Daan Jahja, yang merangkap sebagai Gubernur Militer Kota Jakarta..

Kembali ke Jakarta

Selanjutnya roda pemerintahan RI pun kembali normal hingga datangnya serbuan pasukan Belanda pada Agresi Militer II 19 Desember 1948, dimana seluruh pemimpin Republik ditangkap Belanda dan diasingkan ke berbagai tempat. Sehingga pemerintah Republik terpaksa membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dipimpin Mr. Sjafroedin Prawiranegara di Sumatra Barat. Ibu kota RI baru kembali ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949 dan kemudian ke Jakarta pada 17 Agustus 1950 setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) membubarkan diri dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). ■ [wiki](#)

upaya penculikan dan pembunuhan atas Presiden Soekarno dan pejabat tinggi pemerintah RI lainnya, baik oleh pasukan NICA maupun laskar-laskar rakyat yang tidak sepenuhnya tunduk kepada pemerintahan baru.

Pada 2 Januari 1946, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII mengirimkan surat melalui kurir yang mempersilakan apabila pemerintah RI bersedia memindahkan ibu kota RI ke Yogyakarta atas jaminan mereka berdua. Tawaran ini pun segera disambut baik oleh Bung Karno dan kawan-kawan yang segera membahas persiapannya keesokan harinya dalam sidang kabinet tertutup.

Operasi Rahasia Pemindahan Ibu kota dengan Kereta Api

Mengingat seluruh penjuru kota telah diawasi ketat oleh pasukan NICA dan Sekutu, maka dipikirkanlah cara paling aman untuk melakukan proses evakuasi tersebut. Akhirnya dipilihlah transportasi Kereta Api, mengingat jalur-jalur keretalah yang masih dianggap relatif aman. Jalur yang dilalui: Pegangsaan Timur - Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikampek - Cirebon - Purwokerto

REVOLUSI MENTAL

Berkenalan dengan Sosok Ario Anindito
Komikus Asal Bandung

Dipercaya Menggarap Komik Marvel!

Komikus asal Bandung, Ario Anindito, ditunjuk untuk menggarap komik terbaru Marvel, Star Wars: The High Republic, dimana ia juga diminta untuk mendesain karakter-karakter baru Star Wars.



□ Ario Anindito Komikus Asal Bandung.
Foto: Dok. Ario Anindito/Instagram @arioanin

BRAFOPMK - Bagaikan sebuah kejutan bagi komikus asal Bandung, Ario Anindito, ketika ia mendapat kabar bahwa dirinya ditunjuk untuk mengerjakan proyek komik terbaru Marvel, "Star Wars: The High Republic." Komik ini mengambil latar belakang ratusan tahun sebelum film "Star Wars: Episode I," sebelum ada keluarga Skywalker.

Nama Ario Anindito, yang sudah terpampang di berbagai komik Marvel sejak tahun 2014, dipilih berdasarkan hasil rapat dari beberapa penulis dan tim Star Wars yang "mengkonsepkan semuanya" di Skywalker Ranch. Ini adalah tempat kerja pencipta Star Wars, George Lucas, dan timnya di California, Amerika Serikat. "Sampai sekarang rasanya kayak masih mimpi aja," kata Ario Anindito saat dihubungi VOA di studionya di Bandung, melalui Skype.

Menciptakan Desain Karakter Star Wars Baru

Bekerja sama untuk pertama kalinya dengan penulis asal Inggris, Cavan Scott, yang pernah menulis cerita komik Doctor Who, Vikings, dan Power Rangers, serta *inker* atau peninta, Mark Morales, yang menggarap komik Avengers; Ario berperan penting sebagai *co-creator* alias salah satu pencipta, sekaligus *penciller* atau penggambar.

Sebagai penciller, Ario bertugas untuk menuangkan isi naskah, ke dalam visual di panel-panel komik. "Jadi istilahnya kalau di film itu, aku jadi director dan cameramen. Jadi aku yang menentukan ekspresi karakternya positioning karakternya, terus aku menentukan sudut pandang yang diambil dari mana gitu," ujar komikus yang juga pernah bekerja untuk DC Comics ini.

Ini memang bukan pertama kalinya Ario terlibat dalam penggarapan komik Star Wars produksi Marvel. Ia pernah menggarap komik bertajuk, "Star Wars Annual," pada tahun 2015. Kali ini, perannya yang juga sebagai co-creator, memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendesain karakter-karakter dan planet baru dalam Star Wars.

"Ada beberapa karakter yang belum punya bentuk. Jadi baru ada deskripsinya dan disini aku terlibat langsung mendesain bentuk-bentuk karakternya," jelas Ario. Salah satunya adalah karakter Keeve Trennis yang diciptakan oleh Cavan Scott, seperti dilansir dari situs resmi Star Wars. "Sekarang bisa melihat karakter ini hidup melalui karya Ario dan Mark (Morales) sungguh mengagumkan," kata Cavan Scott.

Elemen Indonesia di Komik

Sebagai komikus dari Indonesia, sesekali Ario menyisipkan gambar atau tulisan unik khas Indonesia, ke dalam gambarnya di komik Marvel. Salah satunya adalah macan Cisewu yang ia gambar di punggung Deadpool beberapa waktu lalu.

Untuk komik baru garapannya kali ini, Ario mengatakan belum mendapat "tempat yang pas" untuk memasukkan sisipan-sisipan yang bertema Indonesia. "Terutama gini, karena kalau di komik-komik sebelumnya *setting*-nya adalah *real life* gitu ya, maksudnya kayak kehidupan sehari-hari," jelasnya.

"Kalau ini tuh *alien universe*. Universe-nya di luar angkasa, terus rata-rata alien. Aku pengin sih masukin, tapi kayak masih belum dapat momen dan spot yang pas buat masukin elemen-elemen Indonesia ke sini," tambahnya.

Berkarya di Tengah Pandemi

Pandemi COVID-19 juga berdampak ke industri komik, seperti perampingan perusahaan, terhambatnya perilisan komik dikarenakan tutupnya tempat percetakan, ditambah lagi toko-toko komik yang mengalami penutupan di awal pandemi. "Komik aku 'Atlantic Attacks' itu kemarin harusnya bulan Maret-April rilis, terus jadinya nggak rilis. Dia baru rilis nanti, November," cerita Ario.

Dampak pandemi juga dirasakan oleh Ario. Biasa menghilangkan kebosanan dengan sesekali menggambar di luar studio, kini semua pekerjaan harus ia lakukan di rumah. Satu hal lagi yang menjadi tantangan adalah ketika menghadapi suasana hati di tengah ketidakpastian ini. "Kita pasti juga mikir kan ada orang-orang yang mengandalkan hidupnya dari jualan sehari-hari, makannya dia itu tergantung jualan di hari itu dan sekarang mereka nggak bisa melakukannya sehari-hari itu gitu kan. Sebagai manusia kita pasti merasakan itu dan sebagai seniman itu ngaruh ke *mood* ku gitu, karena ada perasaan *guilty*," ujar Ario.

Ario sendiri merasa bersyukur masih bisa mendapat pekerjaan di tengah pandemi ini, sementara banyak temannya yang sesama komikus atau penulis mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Namun, Ario berharap bisa tetap mendorong para pelaku di industri komik seperti dirinya supaya tidak "membunuh mimpi" mereka.

"Kalau misalnya sekarang harus berhenti gambar komik dulu misalnya, terus harus kerja yang lain, enggak apa-apa, kerja yang lain dulu. Tapi jangan ditinggalin. Sesekali kalau ada waktu, terus latihan gambar, sesekali kalau ada waktu, terus coba-coba gambar, coba-coba *upload* ke Internet gitu, siapa tahu (bisa) membuka jalan ini dan itu, membuka pintu yang baru," pesannya.

Perjalanan karir Ario dalam mencapai titik yang sekarang, tidaklah selalu berjalan dengan mulus. Walau harus melalui masa-masa yang sulit, termasuk kondisi prihatin seperti pandemi sekarang ini, Ario menolak untuk "mengubur" mimpi-mimpinya. "Kalau kamu percaya, maka kamu akan bisa menggapai (mimpi) itu dan itu yang bikin kita hidup. Itu yang bikin kita merasa menjadi manusia, ketika kita punya mimpi dan kita mewujudkan itu." (voa) ■

INTERNASIONAL



Cerita Sukses Pemindahan IKN Malaysia dan Brasil

BRAFOPMK - Sejumlah negara tercatat berhasil memindahkan ibu kota negaranya (IKN). Di antaranya Brasil dan negara tetangga Malaysia. Tak hanya migrasi secara fisik alias infrastruktur, kedua negara sukses membangun kapasitas SDM di lokasi IKN baru.

Tim *BrafoPMK* merangkum perjalanan pemindahan IKN Malaysia dan Brasil dari berbagai sumber. Berikut pemaparannya.

Malaysia

Putrajaya dulunya adalah lahan perkebunan karet dan kelapa sawit yang bernama Prang Besar. Kemudian pada tahun 1990an, Perdana Menteri Malaysia saat itu, Tun Dr Mahathir Mohamad, memulai pembangunan daerah tersebut menjadi sebuah kota.

Alasannya, Kuala Lumpur sudah terlalu padat sehingga pusat pemerintahan Malaysia perlu dipindahkan ke tempat lain.

Sejak pembangunannya selesai pada 1999 hingga kini, Putrajaya menjadi pusat pemerintahan yang sangat dinamis. Dengan bangunan-bangunan berarsitektur indah dan tata kota yang rapi, Putrajaya dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat sekaligus

penyangga Kuala Lumpur sebagai ibu kota.

Pembangunan kawasan baru ini cukup berhasil karena dalam prosesnya, pemerintah Malaysia memperhatikan segala aspek kehidupan. Termasuk mengedepankan bangunan dengan prinsip hemat energi air dan listrik.

Beda nasib dengan ibu kota negara baru Myanmar, dari sisi populasi, jumlah penduduk Putrajaya meningkat. Misal data pada 2010, jumlah penduduk Putrajaya adalah sekitar 70.000 orang sementara di 2020 jumlahnya bertambah menjadi 110.000 orang.

Brasil

Brasil boleh dikatakan adalah negara yang sukses memindahkan IKN. Negara yang terletak di Amerika Selatan tersebut punya kemiripan dengan Indonesia. Baik secara ekonomi maupun kependudukan.

Keduanya sama-sama memiliki jumlah penduduk di atas 200 juta jiwa dan keduanya sama-sama negara yang masih berkembang. Pada awalnya, Ibu Kota Brasil ada di Rio de Janeiro yang berpenduduk 1,6 juta jiwa, sebelum dipindahkan ke Brasilia.



□ Ilustrasi: BRAFO PMK

Pemindahan IKN Brasil memiliki beragam tujuan, seperti memperbarui kebanggaan masyarakat Brasil dengan membangun IKN modern, melakukan pemerataan ekonomi, dan pemerataan sebaran penduduk.

Dikutip laman **Antara**, Duta Besar Brasil untuk Indonesia Rubem Barbosa menyatakan bahwa tujuan utama dari pemindahan ibu kota Brasil adalah pemerataan ekonomi, pemertaan sebaran penduduk, dan membangun suatu kebanggaan bagi masyarakat Brasil.

Sepuluh tahun pasca-pemindahan ibu kota ke Brasília, pertumbuhan penduduk di Brasil mencapai 14,4 persen per tahun dibandingkan dengan saat masih di Rio de Janeiro yang hanya 4,2 persen per tahun.

Barbosa juga menuturkan bahwa saat itu tidak ada kerugian ekonomi yang dialami oleh Rio de Janeiro akibat adanya pemindahan ibu kota dan Brasília mengalami dampak yang positif akibat pemindahan ibu kota. "Pemindahan ibu kota ke Brasilia berhasil memicu pertumbuhan kota-kota kecil di sekitar Brasilia dan berakibat pada tumbuhnya industri dan pariwisata," jelas dia.

Menurut dia, tantangan yang dihadapi pemerintah Brasil dalam lima tahun pertama pembangunan ibu kota baru di Brasilia adalah harus membangun dari nol dan tidak ada penghuninya.

Pemerintah harus memindahkan penduduk selain membangun infrastruktur awal. Penduduk awal di sana adalah para pegawai pemerintahan dan pekerja

yang turut membangun Kota Brasilia. "Pembangunan ibu kota Brasilia dibangun dari tahun 1956 hingga tahun 1961 di era pemerintahan Presiden Juscelino Kubitschek," katanya.

Tantangan lain, biaya pembangunan yang terus membengkak membuat inflasi, sehingga memicu ke naikan harga-harga. Meski begitu, membangun kota baru tetap merupakan peluang bagi banyak orang untuk mencari solusi kehidupan yang lebih baik.

Dubes Rubem menjelaskan bahwa ide utama membangun Brasilia sebagai ibu kota negara baru didasari atas perkembangan Rio de Janeiro yang terlalu cepat, sehingga tidak bisa mengakomodasi pemerintahan lagi.

Selain itu, menjadi kewajiban pemerintah untuk pemerataan populasi dalam kaitannya dengan memaksimalkan wilayah yang dimiliki negara. "Berbeda dengan Indonesia, waktu itu kami harus membangun Brasilia dari awal, sekitar 1.200 km dari Rio, di mana tidak ada apa-apa di sana pada waktu itu, tidak ada jalan, tidak ada rel kereta, benar-benar operasi besar-besaran yang membutuhkan waktu sekitar 3,5 tahun. Awalnya untuk mengakomodasi 1 juta penduduk, tapi sekarang sudah 3,3 juta penduduk," kata dia.

Saat ini, Brasilia menjadi kota terbesar keempat di Brasil setelah Rio de Janeiro, São Paulo, dan Salvador, serta memiliki pendapatan per kapita tertinggi di Brasil. Daerah sekitar atau wilayah satelit pun turut berkembang. "Kini mereka berkembang menjadi daerah pariwisata dan industri," kata Rudem.. ■

KABAR PMK

Muhadjir: Jangan Persulit Orang Susah!



□ Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat melakukan pengecekan langsung penyaluran bantuan sosial (bensos) di Kota Pekanbaru, Riau. *Foto: Humas Kemenko PMK*

KEMENKOPMK - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mewanti-wanti penyaluran bantuan sosial harus tepat saran. Artinya, bukan hanya benar-benar sampai dan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga harus tepat pengklasifikasian jenis bantuan sosial yang akan diterima. Hal itu dilontarkan langsung Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat melakukan pengecekan langsung penyaluran bantuan sosial (bensos) di Kota Pekanbaru, Riau.

"Tolong diperhatikan ini. Mereka yang masih punya anak sekolah agar diberi PKH (Penerima Keluarga Harapan), yang dapat bantuan sembako, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), dan yang lain juga harus disesuaikan," tegasnya. "Semuanya harus dimudahkan agar kita juga dipermudah. Jangan bikin susah orang susah," sambung Muhadjir.

Tak hanya itu, Menko PMK juga menyambangi secara acak masyarakat yang dikira perlu mendapatkan bantuan dan layak untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah. Salah seorang warga Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Ernida, mengaku belum

pernah sekalipun mendapatkan bantuan sosial. Kepada Pak Menteri, ia mengutarakan harapannya untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pasalnya, anak bungsu dari ibu beranak empat itu masih mengenyam pendidikan di tingkat SMA dan juga membutuhkan biaya untuk hidup sehari-hari.

"Saya saat ini sudah sendiri (janda). Anak empat, yang satu masih sekolah pesantren. Biaya (pendidikan) anak masih nunggak, sebulan Rp1 jutaan. Kadang dibantu anak yang sudah kerja, tapi itu pun kalau lagi ada. Sedangkan, saya kerja sebulan penghasilan Rp1 juta itu cukup untuk makan saja. Jadi saya berharap ada bantuan dari pemerintah," tuturnya. Mendapat hal tersebut, Muhadjir langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Lebih lanjut, mengenai data penerima bantuan sosial, khususnya Kota Pekanbaru, akan diselaraskan.

Selain memantau penyaluran bantuan sosial, Menko PMK pada kunjungan kerja hari ini juga menghadiri pelantikan Rektor Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) periode 2022-2024, dan juga meninjau pelayanan kesehatan di RS Ibnu Sina di Pekanbaru. ■



□ Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika saat Kunjungan Kerja ke Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Foto: Humas Kemenko PMK

KUA Punya Peran Penting Cegah Stunting

KEMENKOPMK - Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri terus menggenjot upaya percepatan penurunan stunting melalui berbagai cara. Salah satunya dengan melakukan revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) guna meningkatkan kapasitas dan fungsi KUA, terutama dalam melaksanakan pembinaan dan bimbingan calon pengantin.

Menurut Femmy, KUA tidak hanya terkait dengan pencatatan pernikahan saja, tetapi juga memberikan bimbingan kepada masyarakat dalam pembinaan keluarga *sakinah mawadah warahmah*, seperti melaksanakan pembinaan dan bimbingan calon pengantin melalui kursus calon pengantin, kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), dan program Pusaka Sakinah yang berfungsi dengan baik.

Apabila fungsi KUA lebih maksimal lagi, maka tingkat perkawinan anak yang cukup tinggi dapat ditekan lagi. Tentu, imbasnya juga akan menekan terjadinya keluarga rentan dan berpotensi menjadi keluarga stunting," tutur Femmy saat Kunjungan Kerja ke Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Kabupaten Temanggung. Femmy memaparkan bahwa ada bulan Juni nanti,

rencananya akan dilaksanakan peluncuran revitalisasi KUA sekaligus mengkoordinasikan kementerian/lembaga lintas sektor dalam mendukung penurunan stunting di Kabupaten Temanggung.

Adapun penetapan Kabupaten Temanggung sebagai kabupaten percontohan ialah dengan mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya angka perkawinan anak dan despensasi perkawinan yang cukup tinggi, angka perceraian sebesar 1.419 kasus, dan angka partisipasi kasar SD/sederajat 106,86% dan SMP/sederajat 98,17%.

Terpisah, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung Yusri, pada tahun 2021, KUA Kabupaten Temanggung telah menerima 503 perkara dan 449 diantaranya merupakan permohonan dispensasi kawin dengan rincian 90% perempuan dan 10% laki-laki.

"Mereka yang mengajukan dispensasi perkawinan tersebut berlatar pendidikan SMP yaitu sebanyak 240 perkara, SD sebanyak 177 perkara, dan SMA sebanyak 32 perkara. Usia termuda yang mengajukan dispensasi berusia 13 tahun 4 bulan. Sedangkan, di lihat dari pekerjaan, anak yang belum/tidak bekerja sebanyak 228 perkara atau 50,77%," imbuh Yusri. ■

KABAR PMK

Internasional GPDRR Jadi Ajang Pamer Pariwisata Indonesia



■ Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadir Effendy (tengah) meninjau destinasi Garuda Wisnu Kencana dan Pura Uluwatu di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Sabtu (29/1/2022). Foto: Humas Kemenko PMK

KEMENKOPMK - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadir Effendy mengatakan didapuknya Indonesia sebagai tuan rumah GPDRR akan berdampak positif untuk pariwisata Indonesia. Persiapan menuju pertemuan internasional *Global Platform for Disaster Risk Reduction* (GPDRR) ke-7 tahun 2022 di Provinsi Bali terus dilakukan.

Di samping mempersiapkan kedatangan para delegasi dan persiapan acara resmi, juga disiapkan kegiatan pendukung yakni berkunjung ke objek pariwisata dan kebudayaan. Beberapa destinasi pariwisata yang diperlukan untuk dikunjungi para delegasi adalah Taman Wisata Budaya Garuda Wisnu Kencana, dan Pura Luhur Uluwatu yang keduanya terletak di Kecamatan Badung, Provinsi Bali.

"Ini merupakan bagian dari program pendukung kegiatan GPDRR yang dimotori Menparekraf. Akan ada kegiatan pendukung yang sifatnya ekshibisi budaya," ujar Muhadir usai meninjau destinasi Garuda Wisnu Kencana dan Pura Uluwatu di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Sabtu (29/1).

Kemegahan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, tambah Muhadir, yang merupakan karya seniman Nyoman

Nuarta dan keindahan Pura Luhur Uluwatu akan menunjukkan citra besar Indonesia di kancah internasional.

"Dan di sini tentu saja akan disajikan berbagai macam aktivitas budaya yang sudah terkenal di kancah internasional seperti Tari Kecak," imbuhnya. "Ini sangat menakjubkan. Suatu karya anak bangsa yang memberikan semacam penanda betapa adiluhung budaya khususnya yang berkembang di Bali ini. Ini saya kira ini suatu karya yang paling monumental dalam sejarah Indonesia kontemporer," sambung dia.

Didampingi oleh Kepala BNPB Suharyanto, perwakilan Kemenparekraf, dan perwakilan TNI Polri, Suharyanto menjelaskan, pihaknya akan mempersiapkan protokol kesehatan yang ketat untuk kunjungan para delegasi internasional. Salah satunya adalah dengan menerapkan sistem *bubble* untuk para delegasi yang berkunjung.

"Nanti diatur sedemikian rupa supaya tetap protokol kesehatannya terjaga. Ini akan kita laksanakan sistem bubble. Artinya pada saat delegasi masuk, pengunjung lain sementara tidak berhubungan dengan mereka," ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala BNPB menyatakan, pihaknya akan mempersiapkan skenario penerapan protokol kesehatan saat para delegasi berkunjung. Dia mengatakan, pembatasan antar pengunjung biasa dengan delegasi biasa akan dilakukan dengan ketat.

Diketahui, pertemuan internasional GPDRR akan diselenggarakan pada tanggal 23-28 Mei 2022 di Bali. Ajang ini akan dilakukan dengan konsep pertemuan fisik, dan rencananya dihadiri oleh 4.000 hingga 5.000 orang peserta dari 193 negara. Pertemuan ini rencananya akan diselenggarakan di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. ■



□ Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Didik Suhardi pada Kegiatan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Budaya Literasi dan Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi dan Inovasi di Hotel Mercure, Jakarta, Kamis (27/1/2022). Foto: Humas Kemenko PMK

Era Digitalisasi 4.0, Pemerintah Perkuat Program Literasi

KEMENKOPMK - Salah satu pilar pembangunan manusia yang perlu diperhatikan yaitu pembangunan karakter yang dapat dilakukan dengan cara pembudayaan literasi baik di lingkup keluarga, pendidikan, maupun masyarakat.

Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Didik Suhardi mengatakan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia masih sangat rendah.

"Berdasarkan data yang kami himpun, tingkat literasi masyarakat kita masih cukup rendah yang dapat dilihat dari beberapa indikator literasi, kita selalu berada di peringkat lima terbawah," ungkap Didik saat memberikan sambutan pada Kegiatan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Budaya Literasi dan Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi dan Inovasi di Hotel Mercure Jakarta, Kamis (27/01).

Indonesia menempati urutan ke 72 dari 78 negara berkaitan dengan tingkat literasi atau berada di 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan *Programme for International Student Assessment* (PISA) yang dirilis *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada 2019.

Peta Jalan Pembudayaan Literasi dibuat pada Tahun 2021 lalu. Dokumen ini merupakan pemikiran bersama lintas pemangku kepentingan. Selanjutnya perlu dibuat payung hukum yang kuat sebagai dasar pembudayaan literasi lintas pemangku kepentingan.

"Tujuan penguatan peta jalan pembudayaan literasi yaitu sebagai arah dan pedoman bersama lintas pemangku kepentingan dalam pembudayaan literasi sekaligus sebagai wadah sinergi lintas pemangku kepentingan untuk mewujudkan masyarakat berwawasan luas," ujar Didik.

Ia juga menyampaikan kebijakan literasi perlu diajukan untuk mendukung pembangunan SDM Manusia Indonesia dalam menghadapi era digitalisasi industri 4.0. Literasi digital perlu didorong seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Peningkatan literasi tidak hanya untuk siswa tetapi juga para guru pendidik.

Selain itu, perlu dipastikan pelaksanaan pembudayaan literasi oleh masing-masing Kementerian dan Lembaga, serta informasi kendala dan tantangan yang dihadapi sehingga dapat dibuat strategi-strategi untuk mengatasinya. Untuk itu koordinasi dan sinkronisasi program antar Kementerian dan Lembaga menjadi penting untuk dilakukan, dan program yang direncanakan tersebut harus dapat diimplementasikan dengan baik. ■

KABAR PMK

Kerja Ekstra Genjot Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda



■ Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK Femmy Eka Kartika Putri pada Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian IPP 2021 dan Pencapaian Target Pembangunan Pemuda Tahun 2022 di Jakarta, Jumat (21/1/2022). Foto: Humas Kemenko PMK

KEMENKOPMK - Pemuda memiliki peran penting dalam membangun bangsa. Untuk itu, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menjadi alat ukur pembangunan pemuda di lima domain dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. 2020, Indonesia memiliki nilai IPP sebesar 51,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 1,67 poin dari tahun 2019.

Padahal target nilai IPP Indonesia di tahun 2024 sebesar 57,67. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK Femmy Eka Kartika Putri menjelaskan, penurunan nilai tersebut disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang berdampak salah satunya pada domain kesempatan dan lapangan kerja.

"Penurunan Indeks Pembangunan Pemuda ini salah satunya ada pada bidang kesempatan dan lapangan kerja. Karena dari 29,12 juta penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, sebesar 27 persenanya adalah pemuda," kata Femmy saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian IPP 2021 dan Pencapaian Target Pembangunan Pemuda Tahun 2022, pada Jumat (21/1).

Ia juga mengatakan perlunya kerja keras dan komitmen bersama dalam menyusun strategi kebijakan yang tepat untuk dapat mendorong ca-

paian target IPP sebesar 57,67 di tahun 2024. Sinergitas semua pemangku kepentingan sesuai dengan skema *pentahelix* yang ada yaitu pemerintah, swasta, dunia pendidikan, media, dan masyarakat (termasuk pemuda dan organisasi kepemudaan) harus terus ditingkatkan pola koordinasi dan komunikasinya serta dimaksimalkan perannya se-

suai dengan potensi yang dimiliki masing-masing.

"Pada tahun 2022 ini kita perlu menyusun strategi koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan terkait dengan target pembangunan pemuda di tahun 2024 nanti.

Sinergitas semua pemangku kepentingan sesuai dengan skema pentahelix yang ada yaitu pemerintah, swasta, dunia pendidikan, media, dan masyarakat (termasuk pemuda dan organisasi kepemudaan) harus terus ditingkatkan pola koordinasi dan komunikasinya serta dimaksimalkan perannya sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing," ujar Femmy.

Sementara itu, Sekretaris Deputi Pemberdayaan Pemuda Pemuda Kemenpora Esa Sukmawijaya, menjelaskan manfaat dari Program Sentra Pemberdayaan Pemuda Desa/Kelurahan untuk mengukur potensi penduduk usia muda yang masuk ke pasar kerja.

"Dengan adanya Program Sentra Pemberdayaan Pemuda Desa/Kelurahan diharapkan dapat mengukur potensi penduduk usia muda yang masuk ke pasar kerja, termasuk pekerja usia muda yang putus asa, dan kaum muda yang bukan angkatan kerja karena disabilitas, mengurus rumah tangga, dan lain sebagainya," jelasnya. ■



□ Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhamdij Effendy melantik 14 Pejabat Tinggi Pratama atau Eselon II di lingkungan Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (11/1/2022). Foto: Humas Kemenko PMK

Lantik 14 Pejabat Eselon II, Muhamdij Ingatkan Soal Program Kerja Prioritas

KEMENKOPMK - 14 Pejabat Tinggi Pratama atau Eselon II di lingkungan Kemenko PMK dilantik Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Muhamdij Effendy.

14 Pejabat Tinggi Pratama atau Eselon II tersebut terdiri dari dua pejabat hasil seleksi panitia seleksi jabatan tinggi madya/pratama Kemenko PMK dan 12 pejabat merupakan hasil rotasi di lingkungan kerja Kemenko PMK. Muhamdij menyebutkan, promosi, rotasi, dan mutasi hal yang biasa dalam rangka pelaksanaan organisasi. Guna meningkatkan semangat dan produktivitas SDM untuk memaksimalkan kinerja organisasi.

"Saya berharap penugasan ini agar dipandang sebagai apresiasi agar saudara-saudara memiliki kesempatan belajar sesuatu yang baru, tantangan yang baru, suasana yang baru. Semakin tinggi jenjang jabatan tentu membutuhkan kemampuan yang oriinal dan wawasan yang lebih luas," terangnya.

Muhamdij juga memberikan arahan dengan menekankan kembali enam prioritas kerja Kemenko PMK di 2022. Pertama, yaitu mengkoordinasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Kedua, penanganan stunting yang masih menjadi tantangan karena harus mengejar target Presiden Jokowi agar penurunan stunting bisa mencapai level 14% pada tahun 2024. Sementara, angka stunting saat ini

masih sekitar 24,4%. Muhamdij mengutarakan bahwa Presiden Jokowi pada saat rapat terbatas, pagi tadi, telah memerintahkan agar penanganan stunting lebih diperkuat. Presiden meminta agar pemerintah khususnya di bawah koordinasi Menko PMK dapat menurunkan angka stunting sebanyak 3% pada tahun 2022.

"Ini sangat berat, tapi kalau selama Covid-19 saja kita bisa menurunkan 1,7% masalah stunting ini, saya yakin kalau sudah tidak Covid-19 menurunkan 3% atau melipatgandakan bukan sesuatu hal yang mustahil. Hanya memang perlu kerja keras dan dukungan yang kuat, terutama dari Kemenko PMK dan seluruh kementerian/lembaga terkait," tuturnya.

Adapun diantara 6 prioritas kerja Kemenko PMK lainnya di tahun 2022, yang ketiga dan tidak kalah penting adalah penanganan kemiskinan ekstrem. Keempat, revitalisasi vokasi. Kelima, penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak. Keenam, peningkatan angka partisipasi kasar dari TK sampai Perguruan Tinggi.

"Saya ingatkan lagi ada 6 prioritas kerja tahun 2022 Kemenko PMK. Saya juga tekankan pentingnya implementasi fungsi KSP dari Kemenko PMK dengan semua K/L di bawah Kemenko PMK dan dengan antar kementerian koordinator yang saling beririsan satu sama lain dalam hal program," tandas Muhamdij. ■

HUMANIORA

Kanker Payudara Urutan Teratas, Kemenkes Siapkan Rencana Aksi Hari Kanker Sedunia



□ *Ilustrasi. Foto: Shutterstock*

BRAFOPMK - Kanker payudara menempati urutan pertama terkait jumlah kanker terbanyak di Indonesia serta menjadi salah satu penyumbang kematian pertama akibat kanker.

Data Globocan tahun 2020, jumlah kasus baru kanker payudara mencapai 68.858 kasus (16,6%) dari total 396.914 kasus baru kanker di Indonesia. Sementara itu, untuk jumlah kematianya mencapai lebih dari 22 ribu jiwa kasus.

"70% dideteksi sudah di tahap lanjut, kalau kita bisa mendeteksi di tahap awal mungkin kematianya bisa kita tanggulangi," kata Elvida Sariwati, Plt Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dalam Temu Media Hari Kanker Sedunia, Rabu (2/2).

Padahal sekitar 43% kematian akibat kanker bisa dikalahkan manakala pasien rutin melakukan deteksi dini dan menghindari faktor risiko penyebab kanker.

Selain angka kematian yang cukup tinggi, penanganan pasien kanker yang terlambat menyebabkan beban pembiayaan yang kian membengkak. Pada periode 2019-2020, pengobatan kanker telah menghabiskan pembiayaan BPJS kurang lebih 7,6 triliun rupiah. "Karena deteksinya sudah di ujung, sehingga pembiayaan yang dikeluarkan semakin besar," katanya.

Tingginya angka kanker payudara di Indonesia menjadi prioritas penanganan oleh pemerintah, namun demikian bukan berarti penanganan kanker jenis lainnya diabaikan. Pada saat yang sama, Kemenkes tetap melakukan upaya penanggulangan terhadap

DATA KANKER DI INDONESIA



□ Infografis: Rifki Setiadi/BRAFO PMK. Sumber Data: Globocan tahun 2020

penyakit kanker lainnya seperti yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Kanker 2022-2022.

Dalam ketentuan ini, Strategi Nasional Penanggulangan Kanker Payudara Indonesia mencakup 3 pilar yakni promosi kesehatan, deteksi dini dan tatalaksana kasus.

Secara rinci ketiga pilar tersebut menargetkan 80% perempuan usia 30-50 tahun dideteksi dini kanker payudara, 40% kasus didiagnosis pada stage 1 dan 2 dan 90 hari untuk mendapatkan pengobatan.

Untuk mencapai target ini, Kementerian Kesehatan tidak bekerja sendiri, melainkan turut dibantu oleh berbagai pihak seperti Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI). Dengan program unggulan sosialisasi skrining dan deteksi dini kanker payudara, YKPI telah berhasil menjangkau lebih dari 150.000 peserta baik secara daring dan luring pada 2016-2021.

"Sejak tahun 2016-2021, YKPI bekerjasama dengan kabupaten/kota melakukan sosialisasi skrining dan deteksi dini kanker payudara. Sampai saat ini sudah 150.000 peserta yang kami anggap sebagai tokoh-tokoh masyarakat yang akan meneruskan ke bawah bahwa beberapa organisasi perempuan sudah memasukan skrining dan deteksi dini kanker payudara sebagai program kerjanya," kata Linda Agum Gumerlar, Ketua YKPI.

Tak hanya itu, YKPI juga membantu menyediakan

mobil mammografi serta aktif melakukan praktik SADARI bagi masyarakat awam dan kader kesehatan.

Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan semakin kuat dan ditingkatkan, dalam kerangka penanggulangan kanker payudara di Indonesia, sehingga semakin banyak pasien kanker yang terselamatkan.

Hari Kanker Sedunia diperingati tanggal 4 Februari setiap tahunnya. Peringatan Hari Kanker Sedunia 2022 mengangkat tema "Close the Cure Gap" yang bertujuan untuk meminimalkan kesenjangan perawatan pada pasien kanker serta menekankan ketertarikan pasien dalam mendapatkan layanan medis. Sebab, saat ini masih terdapat kesenjangan kualitas layanan dalam perawatan pasien sehingga menghambat proses pengobatan.

Sejalan dengan tema ini, pemerintah juga akan memperkuat pelayanan medis untuk pengobatan kanker payudara dengan mengatur pemerataan pelayanan kesehatan bagi pasien kanker guna memudahkan pasien mengakses layanan kesehatan yang memadai.

"Kalau mau kirim untuk dilakukan radio terapi di Indonesia Timur hanya ada di Surabaya dengan masa tunggu yang lama, ini tentu tidak boleh terjadi lagi, pelayanan kemoterapi, radioterapi ataupun imunoterapi ini harus merata," pungkas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Rein Rondonuwu. ■

HUMANIORA

Fasilitasi Bidang Kebudayaan Kembali Hadir, Catat 7 Poin Pentingnya



□ Fasilitasi Bidang Kebudayaan. Foto: Kemendikbudristek

BRAFOPMK - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan akan kembali melaksanakan program bantuan pemerintah berupa Fasilitasi Bidang Kebudayaan (FBK). Fasilitasi Bidang Kebudayaan adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada komunitas budaya dan lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan dalam rangka melakukan dokumentasi karya/pengetahuan maestro dan penda-

yagunaan ruang publik untuk pemajuan kebudayaan.

Pada FBK tahun 2022, ada tujuh kategori prioritas penerima bantuan bagi komunitas budaya dan lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan Tahun



□ Poster FBK. Foto: Dok. FBK

2022, komunitas budaya dan lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan akan menjadi prioritas penerima bantuan jika:

- (1) berdomisili dan akan melaksanakan kegiatan kebudayaan di daerah 3T;
- (2) berada dalam provinsi yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Tahun 2020 lebih rendah dari nilai IPK Nasional Tahun 2020;
- (3) secara programatik melibatkan atau membuka akses kepada partisipasi aktif disabilitas;
- (4) secara programatik melibatkan perempuan sebagai aktor utama dan bertujuan untuk promosi kesetaraan gender dalam penyelenggaraan kegiatan kebudayaan;
- (5) secara programatik melibatkan atau membuka akses kepada partisipasi aktif kelompok lansia;
- (6) melaksanakan kegiatan terkait Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek; dan
- (7) secara entitas maupun secara kepengurusan belum pernah menerima bantuan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan sebelumnya.

Bantuan Pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan Tahun 2022 dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan berupa dokumentasi karya/pengetahuan maestro dan penayagunaan ruang publik. Dokumentasi karya/pengetahuan maestro berupa kegiatan merekam dan merangkum karya atau pengetahuan dari seorang maestro, sedangkan penayagunaan ruang publik berupa pemanfaatan terhadap sarana atau prasarana publik, baik secara fisik maupun virtual untuk kepentingan

pemajuan kebudayaan.

Pendaftaran FBK 2022 akan dilaksanakan pada periode 14 Februari hingga 14 Maret 2022 dengan mengisi borang pengajuan bantuan pada laman <http://fbk.id>. Selanjutnya seleksi serta penilaian kelayakan substansi proposal akan berlangsung pada tanggal 22 Maret s.d. 12 April 2022.

Tema pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan Tahun 2022 adalah "Kearifan Lokal (Sandang, Pangan, dan Papan) untuk Kekinian dan Masa Depan." Tema ini dipilih karena sandang, pangan, dan papan merupakan tiga fondasi utama yang menjadi landasan untuk masyarakat dan berinteraksi dengan alam dan manusia, yang lantas berkembang dan menjadi kekayaan budaya Indonesia hingga kini.

Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan, Bantuan Pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan Tahun 2022 merupakan stimulus dari pemerintah pusat untuk kemudian diduplikasi dan dikembangkan oleh pemerintah daerah. "Tanpa dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat selaku pemilik kebudayaan, program apapun yang digulirkan oleh pemerintah pusat tidak akan mampu menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi dalam pemajuan kebudayaan," ujarnya dalam keterangan tertulis yang tercantum dalam lembar penutup Peraturan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan Tahun 2022.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pendaftaran dan penyelenggaraan FBK 2022 dapat diakses masyarakat melalui tautan berikut: https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/01/Peraturan-Dirjen-Nomor-1-Tahun-2022_Fasilitasi-Bidang-Kebudayaan-2.pdf. ■

HUMANIORA

Riset Pengembangan Vaksin Merah Putih Makin Intensif



□ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko. Foto: BRIN

BRAFOPMK - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko menyampaikan laporan kemajuan pengembangan vaksin merah putih kepada pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI pada rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (24/01). Handoko menjelaskan kalau Pengembangan vaksin se-lama ini dilaksanakan oleh tujuh tim yakni tim dari ITB, UI (2 tim), LBM Eijkman, UNPAD, LIPI dan UNAIR.

Handoko menegaskan, dalam konteks vaksin merah putih, permasalahan utama yang dihadapi adalah, Indonesia belum pernah memiliki tim yang berpengalaman sampai uji klinis dalam pengembangan vaksin dari scratch. Pengalaman tim periset dalam pengembangan vaksin baru sampai uji praklinis. Untuk itulah semua tim yang ada bekerja dengan keras melakukan percobaan untuk mendapatkan hasil yang optimal.

"Sebagian besar vaksin yang diproduksi di Biofarma itu masih berbasis lisensi. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi para periset BRIN," kata Handoko.

Permasalahan lainnya ungkap Handoko, Indonesia belum memiliki fasilitas uji terbatas yang berstandar **Good Manufacturing Practices** (GMP). Selain itu belum mempunyai

fasilitas animal BSL 3 sebagai salah satu fasilitas penting untuk melakukan uji pra klinis.

"Uji pra klinis pertama kita menggunakan mencit, itu kita sudah punya di Cibinong, tapi untuk uji yang menggunakan makaka kita tidak siap," ungkap Handoko.

Untuk itulah, BRIN tutur Handoko, berupaya membangun fasilitas uji terbatas berstandar GMP dan fasilitas uji animal BSL 3 untuk makaka yang berkapasitas 80 ekor. Sebelum terintegrasinya lembaga riset ke BRIN, LIPI bersedia membangun fasilitas BSL 3, namun tidak siap untuk membuat program berkelanjutan dalam memanfaatkan fasilitas tersebut.

"Setelah integrasi ini, maka kami mempunyai kompetensi untuk membangun sekaligus membuat program pemanfaatan yang berkelanjutan," tambahnya.

Handoko menegaskan, BRIN mendukung pengembangan vaksin dari beberapa platform. Dukungan ini merupakan upaya BRIN dalam memberikan kesempatan kepada para periset untuk menambah jam terbang/pengalaman dalam mengembangkan vaksin dari berbagai platform. (pur) ■



□ Menteri Abdul Halim Iskandar saat menghadiri Webinar Covid-19 Varian Omicron secara virtual, dengan tema Omicron, Gejala dan Cara Penanganannya pada Jumat (4/2/2022). Foto: Kemendesa

Cegah Penyebaran Omicron, Mendes Libatkan Seluruh Elemen Desa

BRAFOPMK - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengajak seluruh elemen desa untuk intensifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan penerapan ketat protokol Kesehatan serta mengoptimalkan fungsi Relawan Desa Tanggap Covid-19 di masing-masing Desa hingga pada Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).

Adanya varian baru Covid-19 yaitu Omicron yang sudah terdeteksi mengalami transmisi lokal di Jakarta dan Surabaya, perlu diantisipasi penyebarannya di desa-desa.

"Berdasarkan pengalaman, desa-desa sangat cepat belajar, sigap mengantisipasi penyebaran Covid-19 berikut dampak yang mungkin ditimbulkan selama pandemi ini. Sehingga, sepanjang pandemi, desa tetap berinovasi, desa tetap bangkit, desa tetap tumbuh menapaki jalan kemandiriannya. Saya minta jangan kendor semangat menjaga desa kita. Satgas desa dan pemerintah desa pantau warga yang masuk dan keluar," ujar Menteri Abdul Halim Iskandar, di Jakarta, Senin (24/01/2022)

Gus Halim memprediksi puncak kasus infeksi Covid-19 varian Omicron akan terjadi pada pertengahan Februari atau awal Maret 2022. Dalam mengantisipasinya, Gus Halim meminta warga desa untuk tenang, tidak panik dan tetap harus siap siaga.

"Tentu harus ada peran aktif seluruh warga desa, harus konsisten menegakkan protokol kesehatan dan melaksanakan pengawasan terhadap pendatang secara ketat. Alhamdulillah, setelah menggratiskan vaksin, Bapak Presiden juga telah menggratiskan Booster. Untuk itu, kami semua menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo, atas kebijakan Vaksin Covid-19 dan vaksin booster gratis untuk seluruh warga Indonesia," tegasnya

Gus Halim juga meminta para relawan desa serta para elemen desa diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pengurus Tempat Ibadah, Pengelola Tempat Wisata, serta Pengelola pasar-pasar tradisional serta pihak lain yang dianggap perlu untuk saling berkoordinasi dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ■

HUMANIORA

Kemenag Rampungkan Jaminan Ketenagakerjaan Guru



□ Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdani saat menggelar Rapat Koordinasi yang diikuti para Subkoordinator GTK se-Indonesia di Makassar, Selasa (8/2/2022). Foto: Kemenag

BRAFOPMK - Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Ditjen Pendidikan Islam menggelar Rapat Koordinasi di Makassar, 8 - 10 Februari 2022. Sejumlah persoalan diidentifikasi untuk dibahas dan dicari solusi.

Direktur GTK, Muhammad Zain mengatakan bahwa menyelesaikan permasalahan guru akan berkontribusi positif dalam perbaikan pendidikan di Indonesia. "Mengurus Guru adalah mengurus peradaban," pesan M. Zain, Selasa (8/2)

Rakor diikuti para Subkoordinator GTK se-Indonesia. Ada empat isu yang mengemuka, yaitu: kesejahteraan, karir, kompetensi, dan kualifikasi guru.

Menurut Zain, Kementerian Agama secara perlahan namun pasti mulai menyelesaikan persoalan jaminan ketenagakerjaan. Saat ini sedang dibahas pedoman teknisnya bersama BPJS. "Guru akan makin optimal dalam mengabdi kepada ilmu pengetahuan jika kesejahteraan dan kesehatannya terjamin," jelasnya.

Kementerian Agama juga sedang berupaya mengusulkan penambahan kuota peserta pendidikan profesi guru (PPG), yang tentunya berimplikasi kepada kesejahteraannya. Kemenag juga sudah menyelesaikan tunggakan hutang tunjangan profesi guru, dan lain sebagainya.

Zain menegaskan bahwa negara akan senantiasa hadir untuk menyelesaikan pelbagai permasalahan yang membelit pendidik dan pendidikan. Namun, negara menyadari bahwa persoalan peradaban bukan persoalan semudah membalik tangan.

Sebelumnya, Dirjen Pendidikan Islam M. Ali Ramdhani mengajak para Subkoordinator untuk meneguhkan kembali komitmen mengoptimalkan layanan kepada guru, meski sudah mengalami pergeseran jabatan. "Kementerian Agama memiliki visi yang tertuang dalam PMA 42 Tahun 2016, namun di sisi lain reformasi birokrasi menuntut ada perubahan dari jabatan struktural ke fungsional," jelasnya.

Karena itu, lanjutnya, semua Kasi Guru dan Kasi Tendik ditetapkan sebagai Subkoordinator untuk tetap mengimplementasikan visi Kemenag. Adapun untuk pengembangan profesi dan kompetensi, akan difasilitasi melalui fungsi dirinya sebagai analisis SDM aparatur.

Rapat Koordinasi ini juga menghadirkan Kepala Biro Kepegawaian, para Kasubdit dan subkordinator di lingkungan Direktorat GTK Madrasah. Forum merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk memberikan kebijakan strategis dalam hal peningkatan kompetensi dan kesejahteraan para guru. ■



□ Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali. Foto: Kemenpora

Menpora Pantau Proses Pemain Naturalisasi Secara Ketat

BRAFOPMK - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali angkat bicara soal pesepak bola naturalisasi. Menpora Amali akan lebih hati-hati sebelum memutuskan untuk menyetujui hal tersebut.

"Saya sangat ketat untuk naturalisasi, jangan seperti sebelum-sebelumnya usianya sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjadi penggawa timnas dan bahkan berbagai persyaratan yang tidak bisa dipenuhi, saya tidak mau itu," kata Menpora Amali di Kendari, Rabu (9/2).

Menpora Amali akan mengundang PSSI dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dalam waktu dekat untuk mengetahui alasan naturalisasi pemain. "Saya akan undang PSSI dan pelatih Shin Tae-yong untuk menjelaskan tentang kebutuhan

terhadap naturalisasi itu. Tetapi kalau ada kebutuhan jangka pendek dan itu punya rasionalitas serta alasan yang kuat maka tentu kita akan dengarkan langsung," jelas Menpora Amali.

Kendati demikian, Menpora Amali berharap memaksimalkan talenta pesepak bola di Tanah Air.

"Kita akan dengarkan penjelasan dari pelatih Shin Tae-yong, tetapi terus terang ini kalau toh juga dilakukan ini kebutuhan jangka pendek. Kita tetap berharap dari talenta dan bibit dari dalam negeri," tambah Menpora Amali.

Sebelumnya, ada empat nama yang diminta pelatih Shin Tae-yong untuk proses naturalisasi. Keempatnya yakni Kevin Diks, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Mees Hilgers. ■

SENAYAN

Apresiasi Kesepakatan Pemilu, Puan: Harus Transparan



□ Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: DPR RI

BRAFOPMK - Kesepakatan Pemilu 2024 yang diputuskan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendapatkan apresiasi dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan berharap, keputusan ini membuat persiapan penyelenggaraan pesta demokrasi Indonesia itu semakin matang.

"Saya memberi apresiasi kepada Pemerintah dan penyelenggara pemilu yang bersama-sama DPR telah menemukan kesepakatan dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2024. Kesepakatan yang diambil secara cermat dengan mempertimbangkan segala aspek ini adalah hal yang baik demi semakin terjaminnya hak konstitusional warga dalam Pemilu," tegas Puan, Selasa (25/1).

Pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari diharapkan Puan akan memberikan waktu lebih banyak kepada KPU dalam mempersiapkan Pilkada serentak yang pada 2024 juga akan diselenggarakan, yakni tanggal 27 November. Puan juga meminta pemerintah untuk terus memfasilitasi setiap kebutuhan dalam tahapan Pemilu.

"Saya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan mengawal proses tahapan Pemilu 2024. Dengan begitu, kami berharap, proses Pemilu menjadi transparan dan mengakomodir suara rakyat," ujar Puan. Politikus PDIP itu juga berharap Pemilu akan meningkatkan kualitas demokrasi di Tanah Air dan kejadian petugas meninggal dunia tidak berulang.

"Pemilu 14 Februari, persiapan harusnya lebih matang, agar kekurangan pemilu sebelumnya tidak terulang, sehingga Pemilu berjalan dengan baik dan hak konstitusional rakyat bisa terpenuhi," ucapnya. Ia juga meminta agar dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu, semua harus mengedepankan prokes.

"Termasuk bagaimana dalam proses pelaksanaan nanti, jangan sampai ada celah dalam pemenuhan aspek protokol kesehatan. Sambil kita berharap nantinya kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia semakin membaik," tandasnya. ■



□ Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono. Foto: DPR RI

Sektor Perikanan Kalimantan Potensial, Infrastruktur Ditingkatkan

BRAFOPMK - AKinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) selama periode 2021 mendapatkan pujian dari Komisi IV DPR RI. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono mengungkapkan, Komisi IV DPR RI akan terus mendukung rencana kerja Menteri Kelautan dan Perikanan, terlebih dalam menghadapi situasi yang serba tidak menentu di tengah tengah pandemi Covid-19.

"Mulai dari nilai tukar nelayan, budi daya ikan juga produksi perikanan, investasi sektor kelautan dan perikanan, neraca produk perikanan, juga PDB perikanan banyak mengalami peningkatan yang signifikan. Kami mendorong KKP untuk terus mencanangkan, mengimplementasikan program yang dekat dengan masyarakat luas, yang bisa benar benar memberdayakan kelompok kelompok nelayan yang ada," kata Budi dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri KP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (26/1).

Tak cukup sampai disitu, politisi Partai Gerindra itu juga mengingatkan bahwa pengawasan sumber daya kelautan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Mengingat, terbatasnya anggaran untuk lautan Indonesia yang begitu luas.

"Beberapa waktu lalu komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja di Kalimantan Timur. Kita ini lagi euphoria mau pindah ibu kota. Tapi, infrastruktur pengawasan kelautan di Kalimantan Timur juga (Kalimantan) Utara masih perlu diperhatikan," terangnya.

Budi berharap, kebijakan-kebijakan yang ada ke depannya mendukung persiapan untuk pemindahan ibu kota negara, termasuk pengawasan sumber daya kelautannya. Sebab, begitu besar potensinya apabila mampu dijaga dan dikembangkan. "Saya rasa manfaatnya bakal dinikmati masyarakat banyak, termasuk masyarakat lokal yang ada," tutup legislator dapil Kaltim itu. ■

OPINI

Tantangan dan Strategi dalam Mengisi Kemerdekaan

Oleh : **Usman Manor, S.Hum, M.M**

Analis Sumber Sejarah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)



Indonesia memiliki sejarah panjang dalam upaya memeroleh kemerdekaan. Potensi besar Indonesia sebagai negara adikusa dalam hal sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya kebudayaan memicu bangsa lain untuk menguasai seluruh potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Hal

tersebut menyebabkan Indonesia harus menggapai kemerdekaan secara bersusah payah dengan mempertaruhkan waktu, biaya, tenaga, hingga nyawa. Padahal, mengacu pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Meskipun kemerdekaan merupakan suatu hak, akan tetapi seluruh rakyat Indonesia memiliki kewajiban untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan melalui upaya mengisi kemerdekaan. Oleh sebab itu, mengisi kemerdekaan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan merupakan suatu kewajiban yang penting se layaknya menggapai kemerdekaan itu sendiri.

Kewajiban untuk mengisi kemerdekaan Indonesia menghadapi tantangan yang semakin sulit, terutama pada masa Pandemi Covid-19. Merujuk pada hasil sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, Indonesia memiliki 270,20 juta jiwa penduduk dengan laju pertumbuhan 1,25% per tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tantangan yang besar dalam bidang sumber daya manusia, apalagi dengan adanya 70,72% penduduk yang berusia produktif, yakni 15 hingga 64 tahun. Pada satu sisi, jumlah sumber daya manusia yang besar menjadi tantangan, namun apabila dikelola dengan baik akan mampu menjadi potensi berupa bonus demografi. Tantangan lain yang dihadapi Indonesia terutama dalam

upaya mengisi kemerdekaan adalah transformasi digital pada Revolusi Industri 4.0 dan ketidakpastian global yang memicu laju pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan serta diperkirakan menyebabkan meningkatnya defisit transaksi berjalan sehingga berdampak pula pada kesejahteraan 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia, terutama pada penduduk usia produktif. Selain itu, penduduk Indonesia juga dihadapkan pada tantangan efektivitas pengelolaan sumber daya, perlambatan transformasi struktural, terbatasnya sarana dan aksesibilitas, pemenuhan layanan dasar penduduk, serta ketimpangan kesejahteraan.

Mengacu pada tantangan yang sangat besar tersebut, upaya dalam mengisi kemerdekaan perlu dilakukan dengan sistematis berdasarkan prinsip mematuhi regulasi (*regulation based*), menyandarkan pada bukti ilmiah (*evidence based*), mengacu pada pengalaman masa lalu (*experience based*), dan menggunakan ilmu pengetahuan (*scientific based*) sehingga arah dan target mengisi kemerdekaan tidak menyimpang. Secara regulasi, Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan hukum tertinggi. Mengacu pada kedua aturan tersebut, upaya mengisi kemerdekaan memiliki target dan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban. Target dan tujuan dalam mengisi kemerdekaan tersebut memiliki kriteria jika hendak mencapainya, yaitu mematuhi perintah Tuhan Yang Maha Esa, memanusiakan manusia dengan menjunjung tinggi adab, melakukan kerja sama dan bersatu dalam menjalani kehidupan, menyandarkan semua tindakan pada khidmat kebijaksanaan, serta mengupayakan keadilan.

Pada hakikatnya, kriteria, target, dan tujuan sudah tertuang dalam regulasi di Indonesia, namun terkadang upaya dalam mengisi kemerdekaan terkendala akibat pemahaman dan pengimplementasian tujuan serta kriteria tidak berjalan dengan baik. Untuk itu, mengisi kemerdekaan tidak hanya menggunakan prinsip mematuhi regulasi, melainkan perlu pula sandaran be-



□ Ilustrasi. Foto: Freepik

rupa bukti ilmiah (*evidence based*), mengacu pada pengalaman masa lalu (*experience based*), dan menggunakan ilmu pengetahuan (*scientific based*) karena pada dasarnya mengisi kemerdekaan memiliki sifat yang dinamis dan periode waktu yang panjang. Bukti ilmiah, pengalaman masa lalu, dan ilmu pengetahuan selain regulasi dalam mengisi kemerdekaan diperlukan sebagai sikap, perilaku, dan cara pandang dalam memaknai kemerdekaan sehingga akan lebih mudah dalam rangka mengisi, bahkan mempertahankan kemerdekaan tersebut. Sebagai contoh, munculnya gerakan separatis yang radikal di Indonesia merupakan bukti nyata dari pengalaman masa lalu bahwa terdapat kekurangan dalam hal pemahaman terhadap ilmu pengetahuan dan regulasi sehingga justru mencederai kemerdekaan yang didapat dengan bersusah payah.

Secara implementatif dan kontekstual, kesadaran terhadap tantangan yang dihadapi, target yang hendak dicapai, dan strategi yang digunakan sangat diperlukan dalam mengisi kemerdekaan. Terlebih saat ini Indonesia tengah dihadapkan pada Pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis di segala bidang. Jika dalam upaya menggapai kemerdekaan, Indonesia harus menghadapi musuh yang kasat mata berupa penjajah asing, saat ini Indonesia tengah dihadapkan pada musuh yang tidak kasat mata berbentuk virus dalam rangka mengisi kemerdekaan. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah luar biasa dalam mengisi kemerdekaan, diantaranya me-

mahami kondisi yang sedang sulit sehingga selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki, mengupayakan produktivitas setiap hari dan berani bersaing dengan persaingan sehat, memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial, menerapkan dengan etos kerja yang tinggi, mengedepankan integritas dalam kondisi susulit apapun, membudayakan gotong royong, serta membiasakan untuk selalu efektif dan efisien, baik dalam belajar maupun dalam bekerja.

Upaya-upaya tersebut diyakini akan mampu meningkatkan kualitas yang dimiliki, menyederhanakan permasalahan yang dihadapi, dan mentransformasikan tantangan menjadi peluang sehingga mengisi kemerdekaan bukan hanya mampu mempertahankan kemerdekaan, melainkan menghadirkan inovasi dan kreativitas. Terkini, inovasi dan kreativitas dalam mengisi kemerdekaan tersebut tercermin dalam kemampuan adaptasi penduduk Indonesia yang mengadikkan berbagai kolaborasi pada Era New Normal hingga merdeka belajar bagi generasi penerus di Indonesia meskipun pada prakteknya perlu pengawasan efektivitas pendidikan yang merdeka tersebut. Pada akhirnya, mengisi kemerdekaan pasti akan menghadapi tantangan, namun selalu terdapat strategi dalam implementasi upaya mengisi kemerdekaan dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. ■

BRAFOPMK



Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Selamat
Memperingati
Isrā Mi'rāj
1443 H

Semoga syafaat
Nabi Muhammad SAW
menyertai kita

dalam ikhtiar perubahan
menuju bangsa
yang lebih baik. Aamiin.

BRAFOPMK



Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia

inspiratif
bijak
terpercaya
ramah
energik
optimisme
cerdas
jiwa muda
semangat
kebaikan
inovasi
kesejahteraan

Tetaplah Berpijar!

SELAMAT

HARI PERS NASIONAL



Bentuk dan Informasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Selamat Tahun Baru Imlek 2022

2573 Kongz Li

MARI MENJAGA KERUKUNAN
DAN KEHARMONISAN HIDUP,
TANGKAL SIKAP DAN
TINDAKAN INTOLERAN
DEMI KEUTUHAN
BANGSA INDONESIA

